

Media Edukasi dan Informasi Keuangan

EDUKASI KEUANGAN



“COMET”
Dari BPPK untuk
Kementerian Keuangan

Edisi 22/2014

ISSN: 2086-4833



CALL CENTER

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN - REPUBLIK INDONESIA

HALO BPPK



021-29054300

hubungi kami untuk informasi:

#diklat keuangan negara

#beasiswa

#STAN

#pengaduan dan saran

Jam layanan:
setiap hari kerja Pkl. 08.00 s.d 16.00

Social Media BPPK:



Find Us on Facebook
facebook.com/bppk.kemenkeu



Follow Us on Twitter
[@BPPKkemenkeu](https://twitter.com/BPPKkemenkeu)
[@BPPKlive](https://twitter.com/BPPKlive)

Daftar Isi

Salam Redaksi	2
Lintas Peristiwa	4
Liputan Utama	6
Liputan Khusus	14
Profil	18
Kuis	22
Serambi Ilmu	23
Mata Air	53
Klinik Sehat	55
Tips n Trik	57
English Corner	59
Selasar	60
Point Of Interest	61
Kalender Diklat	63
Resensi Buku	64
Kang Edu	65

Salam Redaksi

Salam Edukasi untuk para pembaca. Kami kembali menyapa Anda di edisi pertengahan tahun ini memberikan pengetahuan dan informasi yang bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Kebutuhan akan berkomunikasi bagi setiap orang memperkuat istilah yang kita kenal sejak lama, yaitu manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa adanya orang lain. Adanya media komunikasi yang tepat membantu kita semua menjadi makhluk sosial yang suka atau tidak suka, patuh pada istilah di atas.

Kami mencoba mengangkat tema komunikasi pada liputan utama edisi kali ini, seputar perlunya komunikasi dan media komunikasi dalam sebuah organisasi. Liputan utama menyajikan konsep komunikasi pada sebuah organisasi, media komunikasi yang digunakan dan bagaimana sebuah media komunikasi dengan skala terbatas di satu unit menjelma menjadi media komunikasi yang berskala nasional. Proses, mulai dari ide awal sampai rencana implementasi secara nasional akan digali secara mendalam dalam format wawancara kami.

Terobosan dan peran Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan BPPK dalam menjalankan program nasional PPAKP, serta *training* spesial dari Pusdiklat Bea dan Cukai menghiasi rubrik Liputan Khusus. Kami tetap menyajikan menu istimewa untuk menambah pengetahuan kita. Artikel ilmiah populer di bidang perpajakan, manajemen resiko dalam PBJ, komunikasi interpersonal dan langkah praktis dalam manajemen kelas, adalah beberapa tulisan tersaji dalam Serambi Ilmu. Profil kali ini akan menyuguhkan seorang perempuan tangguh yang memimpin sebuah kantor unit teknis pelaksanaan diklat di daerah.

Ringan namun bermakna, demikian yang kami inginkan pada beberapa rubrik lainnya antara lain kesehatan, resensi, tips dan trik serta kuis yang selalu ditunggu pembaca setia majalah Edukasi Keuangan.

Pada kesempatan kali ini juga, Tim Redaksi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadhan untuk semua pembaca Edukasi Keuangan yang menjalani. Selamat membaca dan semoga apa yang kami sajikan dapat menambah khasanah dan wawasan Anda.

Terima kasih dan tetap berkarya tiada henti.

Susunan Redaksi

Penanggung Jawab

Sekretaris BPPK

Pengarah

Kapusdiklat PSDM

Kapusdiklat Anggaran dan

Perbendaharaan

Kapusdiklat Bea dan Cukai

Kapusdiklat Pajak

Kapusdiklat KNPK

Kapusdiklat Keuangan Umum

Direktur STAN

Pemimpin Redaksi

Iqbal Soenardi

Redaktur

Marsedi Situmorang

Retno Utari

M. Ridhwan

Surono

Ahmad Fatkhur

Supriyanto

Bambang Roosdiyanto

Bambang Sancoko

M. Ridhwan Galela

Indrayansyah Nur

Nurhidayati

Agus Suharsono

Sugeng Satoto

Agus Hekso Pramudji

Gathot Subroto

Eduard Tambunan

M. Ichsan

Wawan Ismawandi

Editor

Romy Setiawan

Edy Basuki Rakhmad

Shera Betania

Yohana Tolla

Layout

Muhammad Fath Kathin

Unggul H. Muhammad

Desain Grafis dan Fotografer

Victorianus M. I. Bimo Adi

Eros Lassa Mursalin

Sekretariat

Alyn Dwi Setyaningrum

Hendra Putra Irawan



Redaksi menerima artikel untuk dimuat dalam majalah ini. Artikel ditulis dalam *huruf Arial 11 spasi 1,5* maksimal 5 halaman. Artikel dapat dikirimkan ke edukasikeuangan@depkeu.go.id. Isi majalah ini tidak mencerminkan kebijakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Alamat Redaksi
Jl. Purnawarman No. 99 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12210
Telp: +62 22 7394666, 7244873 Fax: +62 22 7262275
<http://www.bppk.kemenkeu.go.id>



Aula Mezzanine - Gd. Kementerian Keuangan - Jakarta, Selasa, 29 April 2014
Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Demokratik Timor Leste melaksanakan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding / MoU) yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan RI, Chatib Basri, dengan Minister of Foreign Affair and Cooperation, José Luís Guterres. Foto:Eros L. Mursalin

Seminar “Prospek dan Tantangan Penerapan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara”



Foto: Eros L. Mursalin

BPPK melalui Pusdiklat Keuangan Umum menyelenggarakan seminar yang bertajuk “Prospek dan Tantangan Penerapan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara” pada Kamis, 22 Mei 2014 di Aula BPPK. Seminar ini diikuti oleh 130 peserta yang merupakan perwakilan dari unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Bertindak sebagai narasumber adalah M. Suhada, S.IP, M.M. (BKN), Dr. Andi Taufik, M.Si (LAN), dan Dra. Humaniati (Biro SDM Kemenkeu). Keynote speech disampaikan oleh Wakil Menteri PANRB, Prof. Dr.rer.publ. Eko Prasajo, S.IP, Mag.rer.publ, beliau berharap agar apa yang telah dilakukan Kementerian Keuangan sebagai pionier dalam reformasi birokrasi bisa menjadi contoh dan terus dilanjutkan demi kebaikan bangsa dan Negara serta Aparatur Sipil Negara (ASN).

Penutupan Workshop Penindakan Kepabeanan dan Cukai Eksekutif dan DTSS Penindakan Kepabeanan dan Cukai Tahun Anggaran 2014



Foto: Shera Betania

Penutupan dilaksanakan pada Minggu, 19 Mei 2014 di Bogor. Penutupan ini diisi dengan simulasi penindakan oleh para peserta diklat di depan Kepala Pusat Kepatuhan Internal DJBC, Untarto Wibowo, Kepala Pusdiklat Bea dan Cukai, Agus Hermawan serta Plt. Kakanwil Jawa Barat, Saepullah Nasution.

Dialog SDM Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan mengadakan kegiatan bertajuk “Dialog SDM Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” pada hari Selasa, 24 Juni 2014 bertempat di Ruang Diskusi Pusdiklat KNPk, Jurangmangu. Dialog dihadiri oleh perwakilan dari Pemerintah Daerah di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Melalui dialog tersebut, Pusdiklat KNPk hadir dan mengakomodir kebutuhan Pemda yang hadir, sebagai masukan atas diklat atau program yang akan diselenggarakan nantinya.



Foto: Eros L. Mursalin

Seminar Kepemimpinan Nasional “Fit and Match Leadership: an Ideal Breakthrough To Lead Y Generation”

Balai Diklat Kepemimpinan Magelang menyelenggarakan Seminar Kepemimpinan Nasional yang dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan Jawa Timur pada tanggal 22 Mei 2014 di Surabaya. Seminar Kepemimpinan Nasional ini menghadirkan narasumber Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas.



Foto: M. Fath K.



Ada Apa Dengan Media Sosial?

Oleh: Shera Betania

Sebagian besar dari masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan saat ini tentu sudah tidak asing lagi dengan yang namanya internet. Siapa yang tidak kenal dengan internet? Apalagi di jaman sekarang ini, dimana hampir semua orang tidak dapat lepas dari teknologi dan internet. Secara sadar atau tidak sadar, setiap harinya kita pasti selalu berhubungan dengan internet. Hampir semua perangkat elektronik saat ini menggunakan manfaat internet dalam pengoperasiannya.

Jika ditanya apa aktivitas favorit para pengguna internet, atau yang akrab disapa netizen, pasti **social networking melalui media sosial (social media)** jawabannya. Secara singkat, media sosial merupakan media online yang

mendukung interaksi sosial. **Media sosial** adalah saluran atau sarana bersosialisasi secara online, dimana para penggunanya bisa berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi. Para pengguna (*user*) media sosial berkomunikasi, berinteraksi, saling kirim pesan, dan saling berbagi (*sharing*), dan membangun jaringan (*networking*). Media sosial mengizinkan penggunanya untuk dapat terhubung dengan cara membuat informasi pribadi sehingga dapat terhubung dengan orang lain, bisa melalui tulisan, gambar, bahkan video. Media sosial tidak mengenal batasan, dapat digunakan oleh seluruh kalangan, mulai dari kalangan kelas bawah hingga kalangan menengah ke atas.

Ciri-ciri media sosial antara lain fleksibel (bisa digunakan siapa saja, kapan saja dan untuk berbagai kepentingan), populer (disukai oleh banyak orang), interaktif dan aktual (cepat dan seketika). Saat ini media sosial sangat diperhitungkan karena fungsi yang dimilikinya, antara lain dapat menunjang kegiatan pendidikan, membuat penggunanya lebih mudah berbagi informasi, membuat kegiatan belajar menjadi menyenangkan dan dapat membangun komunitas.

Dan jika berbicara media sosial yang menjamur, Facebook adalah salah satunya. Indonesia merupakan Negara dengan jumlah pengguna Facebook tertinggi di Asia. Selain facebook, saat ini beberapa media sosial juga sedang menjadi 'idola' netizen, antara lain Twitter, Instagram dan Path. Sebelumnya, blog seperti wordpress, tumblr atau blogspot juga pernah mengalami masa kejayaannya. Dari semua media sosial yang ada, facebook tetap menjadi idola dan masih tetap bertahan. Facebook memiliki lebih dari 1 miliar pengguna, terbesar untuk urusan pengguna.

Intranet Kemenkeu

Adapun keuntungan penggunaan intranet, khususnya di sebuah organisasi, antara lain:

1. Produktivitas kerja, Intranet membantu pengguna untuk menemukan informasi secara cepat, menggunakan aplikasi yang sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya, serta mengakses database yang diperlukan.
2. Efisiensi Waktu, Dengan Intranet, organisasi/perusahaan dapat memberikan informasi yang lebih lengkap kepada para anggotanya/karyawan.
3. Komunikasi, Intranet memberikan fasilitas yang memungkinkan komunikasi efektif di dalam sebuah organisasi, baik secara vertical (bawahan-atasan) maupun horizontal.
4. Sistem publikasi web :

- memungkinkan data-data organisasi/perusahaan diakses secara mudah misalnya pedoman anggota/karyawan, data keuntungan, kebijakan organisasi/perusahaan, data pelatihan.
5. Efektivitas Biaya, pengguna data dapat melihat atau membaca data melalui *web browser*.
 6. Keseragaman Informasi : Intranet menjamin keseragaman informasi yang diterimarena semua pengguna melihat informasi yang sama di intranet.
 7. Meningkatkan Kerjasama : Dengan informasi yang mudah diakses oleh semua pegguaan resmi (internal), kualitas kerja tim (team work) akan meningkat.

Dari penjelasan tersebut, kita bisa mengetahui perlunya intranet dalam suatu organisasi. Tidak hanya dari segi efisiensi, namun efektivitas juga menjadi pertimbangan penting. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) sebagai salah satu unit di Kementerian Keuangan telah memanfaatkan jaringan intranet untuk mendukung pelaksanaan tugas fungsinya. Aplikasi yang dibangun diberi istilah Intranet BPPK. Lalu, bagaimana dengan aplikasi intranet BPPK yang akan menjadi aplikasi intranet Kemenkeu?

Intranet BPPK telah ada dari tahun 2009, dibangun dan dikelola oleh Bagian TIK. Intranet BPPK dimanfaatkan oleh seluruh pegawai BPPK untuk saling bertukar data dan informasi, bahkan untuk berkomunikasi. Hadirnya intranet BPPK telah memberikan manfaat yang cukup besar dan telah mengotomasi beberapa kegiatan yang pada mulanya dilakukan secara manual, seperti penyampaian surat edaran, peraturan, pengumuman, dll, sehingga memudahkan pegawai untuk mendapatkan informasi secara cepat, walaupun lokasi unit kerjanya terpisah dengan kantor pusat. Seiring berjalannya waktu pemanfaatan intranet BPPK dirasakan stagnan, sehingga perlu

dilakukan inovasi agar pemanfaatan intranet bisa lebih optimal.

Intranet BPPK adalah aplikasi yang dibangun diatas jaringan komputer lokal (jaringan Kementerian Keuangan) yang menggunakan protokol internet untuk dapat melakukan pertukaran data dan informasi secara aman di lingkungan internal BPPK. Intranet BPPK digunakan untuk kepentingan kedinasan, seperti penyampaian informasi beasiswa, undangan rapat, pengumuman, berita, artikel, surat edaran dll. Aplikasi intranet BPPK juga dimanfaatkan sebagai media komunikasi forum diskusi dan chating antar pegawai.

Sebagai bentuk monitoring dan evaluasi atas intranet BPPK pada pertengahan tahun 2012 Bagian TIK melakukan survey terkait Intranet BPPK meliputi, kemudahan akses, tata letak, pemanfaatan dan interface. Dari hasil survey tersebut mendapatkan kesimpulan bahwa aplikasi intranet BPPK saat ini perlu dikembangkan, dibuat lebih menarik, dan perlu disusun strategi agar pemanfaatan intranet BPPK lebih ditingkatkan.

Intranet BPPK yang baru telah berjalan sejak tahun 2012. Tidak hanya dari sisi desain atau tampilan, namun juga dari sisi fasilitas dan pendekatan. Pendekatan yang digunakan intranet BPPK ini adalah konsep media sosial.

Pengembangan intranet BPPK diharapkan bisa sesuai dengan kebutuhan pengguna dengan asumsi:

- ▶ Format intranet yang akan dibuat dengan konsep sosial network cukup menarik minat user, karena konsep sosial network seperti facebook sudah cukup familiar.
- ▶ Semua pegawai mau memanfaatkan intranet BPPK
- ▶ Akses intranet cukup baik.

Pada pertengahan tahun 2014, intranet BPPK akan meningkatkan performanya menjadi intranet Kemenkeu. Survey di tahun 2012, yang dilakukan di BPPK,

menjadi dasar untuk melakukan perombakan pada intranet BPPK. Perombakan tersebut membawa nilai positif bagi BPPK dan kedepannya mampu memberikan dampak positif bagi Kementerian Keuangan.

Keuntungan dan keakraban Facebook dengan pengguna internet di lingkungan Kemenkeu dipadukan dengan informasi internal Kementerian Keuangan. Jadilah Intranet Kementerian Keuangan yang bernuansa media sosial. Strategi ini dimanfaatkan, selain agar dapat menarik pegawai Kemenkeu untuk menjadi pengguna intranet, namun juga informasi yang terdapat di dalam intranet tidak lagi bersifat formalitas, namun lebih fleksibel. Nuansa keakraban yang tercipta dalam media social turut dibawa kedalam Intranet Kemenkeu. Berbagai pendapat, opini, informasi, berita dan masalah yang mungkin ada bisa dibahas di dalam intranet Kemenkeu. Semua pendapat ditampung, asal sesuai dengan etika dan kaidah bersosialisasi.

Semua pengguna intranet Kemenkeu memiliki hak untuk mendapatkan informasi. Termasuk di dalamnya mengenai kebijakan-kebijakan yang berlaku di Kemenkeu, kebijakan dan peraturan kepada masyarakat yang perlu diketahui, bahkan informasi yang bermanfaat untuk pengembangan kompetensi pegawai Kemenkeu. Selain itu, melalui berbagi informasi, berbagai ide dan masukan bisa diperoleh, sehingga tidak perlu lagi repot-repot untuk mengumpulkan ide dari banyak pegawai atau pengguna intranet. Intranet Kemenkeu juga menyediakan sarana survey yang dapat membantu dalam mengumpulkan opini atau pendapat pegawai Kemenkeu.

Intranet Kemenkeu dengan nuansa media social diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kemenkeu, dan dapat meningkatkan kinerja Kementerian Keuangan.



COMET Communication Media for Education and Training

Sekilas Tentang COMET

Oleh: Shera Betania

Manfaat intranet sangatlah banyak, terutama bagi institusi dengan jumlah pegawai yang sangat banyak. Sebaran pegawai dan jumlah informasi harus seimbang, sehingga tidak ada lagi gap atau ketimpangan arus informasi antara yang di pusat dan di daerah. Maka dari itu, pengembangan struktur dan konten intranet perlu mempertimbangan kebutuhan informasi dan user-friendly.

Intranet perlu dikembangkan dan dibuat lebih menarik sehingga bisa menjadi media yang lebih dimanfaatkan dan dijadikan sarana komunikasi dan pertukaran informasi di Kementerian Keuangan.

Cikal bakal intranet Kemenkeu adalah Intranet BPPK format baru yang telah ada sejak akhir 2012. Karena penyajian informasi, tampilan yang menarik dan user-friendly nya, intranet BPPK diusulkan untuk menjadi intranet Kemenkeu. Nama Intranet BPPK adalah COMET: Communication Media

for Education and Training, media komunikasi pegawai Kemenkeu, saling bertukar informasi berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan antara lain:

- ▶ Intranet dijadikan sebagai media pertukaran data dan informasi secara optimal
- ▶ Intranet benar-benar dijadikan media komunikasi internal
- ▶ Penerapan Single sign on (SSO), menggunakan akun email Depkeu
- ▶ Tampilan dibuat lebih menarik, sehingga menarik minat user untuk berkunjung dan berkelana di dalam intranet
- ▶ Sistem dibuat lebih interaktif
- ▶ Informasi update
- ▶ Perlu dibuat rencana strategi agar intranet dimanfaatkan secara optimal

Fasilitas/fitur dalam intranet BPPK Baru

Menjawab kebutuhan akan intranet

yang lebih menarik dan interaktif dari sebelumnya, maka rencana pengembangan aplikasi intranet menggunakan konsep sosial network seperti facebook. Konsep sosial network (konsep facebook) dipilih karena facebook sudah cukup familiar di lingkungan pegawai, mayoritas pegawai BPPK (bahkan Kemenkeu) memiliki akun facebook, ini terlihat dari friend list para pegawai di akun facebook, konsep kebebasan berekspresi juga diusung dalam konsep intranet ini, dimana setiap pegawai boleh menuangkan ekspresi hatinya dalam intranet seperti layaknya facebook, boleh melakukan upload photo, membuat pages, dll.

Beberapa fasilitas yang terdapat dalam intranet BPPK yang nantinya akan tetap ada di intranet Kemenkeu antara lain:

- ▶ Home, merupakan halaman awal (halaman muka) dari intranet BPPK, halaman home ini berisi kutipan-kutipan berita, forum diskusi, event dan random video
- ▶ Streaming, merupakan halaman BPPK TV, yang berisi kegiatan streaming secara live (langsung) ataupun secara tidak langsung, serta pemutaran film-film, video-video dan musik
- ▶ APPS, merupakan halaman yang berisikan aplikasi-aplikasi dilingkungan Kemenkeu seperti aplikasi monitoring absensi, simpeg, simdiklat, dll. Untuk dapat mengakses aplikasi ini, maka user (pengguna) intranet diwajibkan melakukan login kembali, kedepannya akan diterapkan sistem Single Sign on (SSO) dimana user melakukan login cukup 1 (satu) kali, yaitu pada saat mengakses intranet, maka secara otomatis user inipun bisa mengakses aplikasi-aplikasi yang terdapat dalam intranet tanpa melakukan login ulang sesuai dengan hak aksesnya (user level management).
- ▶ Member, merupakan halaman yang berisi seluruh user yang merupakan pengguna intranet Kemenkeu

- ▶ News, merupakan halaman yang berisi konten berupa berita, artikel, pengumuman, surat edaran, dll, yang berhubungan dengan kedinasan
- ▶ Forum, merupakan halaman yang disediakan sebagai media sharing informasi atau diskusi terkait topik tertentu. Di halaman forum diskusi ini terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu: forum sekretariat, forum diklat dan forum umum.

Selain fasilitas yang telah disebutkan, intranet Kemenkeu nantinya juga akan menyediakan fasilitas bagi usernya untuk dapat saling berkomunikasi, memanfaatkan intranet Kemenkeu layaknya social media, untuk saling bertukar informasi, chatting, upload foto atau video, dan lain sebagainya. Beberapa fasilitas tersebut antara lain:

- ▶ Sosial Network, merupakan halaman yang berisi pesan status (kabar berita) dan photo terbaru dari seluruh *friends* seorang user (pengguna intranet). Pada halaman ini user juga bisa melakukan updating data profilnya
- ▶ Photo, merupakan halaman yang berisi photo-photo yang di upload oleh seluruh user intranet
- ▶ Friends, merupakan halaman yang berisi daftar teman seorang user
- ▶ Page, merupakan fasilitas yang disediakan intranet BPPK yang dapat digunakan oleh user untuk membuat suatu komunitas/grup tertentu
- ▶ Event, merupakan fasilitas yang disediakan intranet untuk menginformasikan suatu kegiatan baik terkait kegiatan kedinasan maupun kegiatan pribadi yang dibuat oleh user.
- ▶ Chating, merupakan fasilitas yang disediakan intranet sebagai media komunikasi. Fitur chating ini hanya bisa dilakukan oleh seorang user yang telah memiliki hubungan pertemanan, dan sedang dalam kondisi online.

Beberapa fitur yang terdapat dalam Intranet BPPK yang juga ada di Intranet Kemenkeu antara lain:

1. Login User

Login User merupakan halaman utama dari intranet. Untuk dapat masuk dan mengakses intranet BPPK, maka user harus melakukan login terlebih dahulu. Apabila user belum terdaftar, di halaman utama disediakan fasilitas pendaftaran, yang berisi antara lain: nama, nama pengguna, email, kata sandi, NIP, jabatan, dan unit.

2. Home

Pada Home atau serambi intranet terdapat konten berupa Berita (news) yang berisi pengumuman, surat edaran, artikel, peraturan, himbauan, kegiatan (event), diskusi (discussion), yang terus diperbaharui. Konten ini bisa dibaca oleh user/pengguna dari intranet BPPK yang telah melakukan login.

3. Aplikasi, yang terdiri dari link aplikasi dan icon aplikasi

Link aplikasi terdiri dari 3 submenu, yaitu:

- ▶ Simpeg Kemenkeu
- ▶ Simdiklat BPPK
- ▶ E-registration Diklat BPPK
- ▶ Kumpulan Peraturan
- ▶ Laporan, terdiri dari: Laporan Keuangan (laporan realisasi anggaran dan kirim data laporan keuangan) dan LAKIP

Sedangkan icon aplikasi terdiri dari: Aplikasi Monitoring Absensi, SMS gateway, Monitoring Pengadaan, Kliping Berita, SJDIIH-BPPK dan diantara kita. Untuk dapat mengakses aplikasi pendukung pada intranet BPPK user harus melakukan login kembali sebagai user dari aplikasi pendukung tersebut.

4. Media Komunikasi

Media komunikasi terdiri dari forum diskusi, chating dan diantara kita. Pada mulanya forum diskusi dan chating cukup sering digunakan oleh pegawai BPPK, namun seiring berjalannya

waktu kedua fasilitas ini semakin jarang dimanfaatkan. Sedangkan menu diantara kita berisikan ucapan dan berita, kelahiran, dukacita dan Pernikahan yang selalu di update oleh Bagian TIK apabila ada laporan berita.

5. File Sharing

File sharing berisikan formulir, user requirement, surat, monitoring alat pengolah, sop, tutorial, dll. Merupakan dokumen yang bisa diunduh oleh user/pengguna intranet BPPK.

6. Galeri

Galeri berisikan foto-foto dan video kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

7. Pengaduan

Pengaduan terdiri dari kepatuhan internal, dimana disini disediakan form isian bagi pegawai yang ingin melakukan pengaduan dan Wise Kemenkeu yang merupakan link aplikasi dari Wise Kemenkeu.

Secara garis besar, siapapun bisa mengunjungi intranet Kemenkeu, asalkan berada di jaringan Kemenkeu (yang dikelola oleh Pusat Informasi dan Teknologi Kemenkeu). Pengunjung intranet Kemenkeu dibagi menjadi dua, yaitu **User**, yaitu Pengguna atau pemilik akses Login (masuk) ke Intranet, yaitu pegawai Kemenkeu yang memiliki NIP, dan **Pengunjung Situs** yang memiliki keterbatasan untuk melihat intranet secara menyeluruh, terbatas hanya pada halaman awal/halaman muka intranet yang berisikan cuplikan news, forum diskusi, dan video. Khusus untuk video, pengunjung dapat mengaksesnya secara full.



Foto: Eros L. Mursalin

COMET (*Communication Media for Education and Training*) - **Dari BPPK untuk Kementerian Keuangan** Wawancara dengan Iqbal Soenardi, Ak., MBA

IntraBPPK atau yang lebih dikenal dengan COMET, dikembangkan oleh Bagian TIK BPPK dengan pendekatan media social. Melihat kesuksesan dan aktifnya media intranet ini, secara aklamasi, tim pengembangan komunikasi dan layanan informasi Kementerian Keuangan memilih COMET untuk menjadi Intranet Kemenkeu. Berikut adalah wawancara singkat dengan Iqbal Soenardi, Kepala Bagian TIK di BPPK, seputar pengembangan COMET dan prosesnya menjadi Intranet Kementerian Keuangan.

Bisa diceritakan, bagaimana awal pengembangan COMET?

Menyusul keberhasilan pembangunan sejumlah produk berbasis teknologi informasi dan komunikasi di akhir 2010, seperti BPPK-TV, Website BPPK yang baru, VOD BPPK, dan VOIP BPPK, serta upaya rintisan untuk membudayakan pemanfaatan fasilitas Video Conference untuk menunjang koordinasi dan komunikasi internal BPPK, maka pada 2011, Bagian TIK BPPK mulai merintis pembangunan aplikasi IntraBPPK (intrabppk.depkeu.go.id) untuk menggantikan portal intranet sebelumnya untuk lebih menarik pengunjung. Aplikasi IntraBPPK inilah yang bertransformasi menjadi aplikasi COMET (Communication Media for Education and Training) pada awal 2014.

Selain dimaksudkan untuk menjadi “rumah” bagi BPPK-TV, COMET juga diharapkan dapat menjadi media komunikasi dan koordinasi internal yang dapat diakses oleh seluruh pegawai yang terdaftar sebagai *member* dengan memanfaatkan email depkeu sebagai salah satu prasyarat utama. Oleh karenanya, COMET harus dirancang semenarik, secanggih, dan seinteraktif mungkin, namun sederhana dan mudah dimengerti oleh *member* yang paling gptek sekalipun. Berdasarkan pertimbangan ini, serta hasil observasi terhadap perkembangan aplikasi media sosial di masyarakat, dimana kami memperoleh informasi bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang paling aktif memanfaatkan media sosial seperti facebook dan twitter. Kami memutuskan untuk mengadopsi konsep media sosial khususnya *facebook* ke dalam COMET. Keputusan pemanfaatan konsep media sosial ini kelak didukung hasil riset Branfog pada 2013 yang lalu, yang dapat dicermati pada gambar berikut:

Intinya, berdasarkan riset Brandfog 2013, media sosial dapat dimanfaatkan oleh para CEO untuk secara sangat efektif

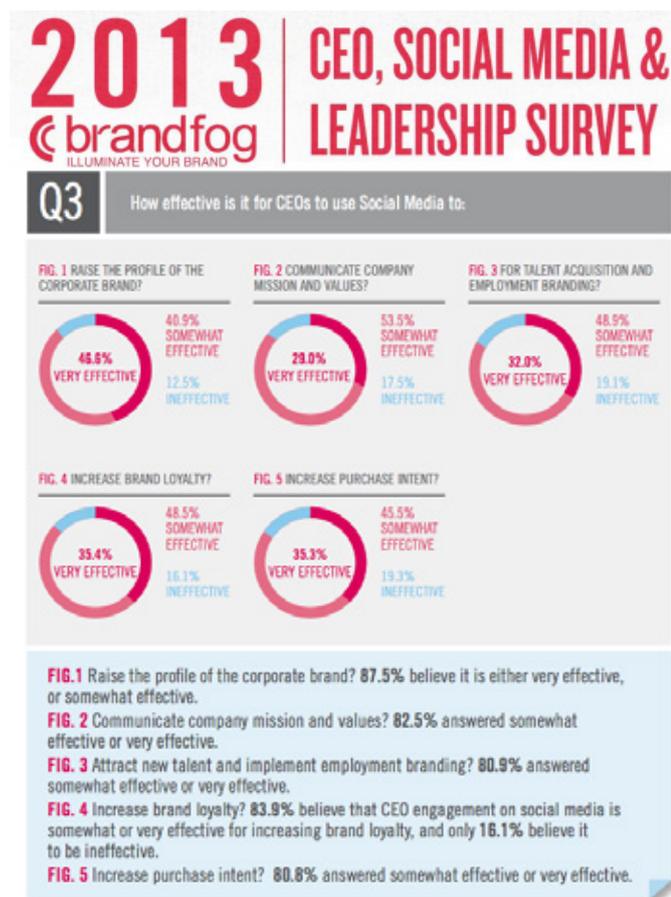
meningkatkan *brand image* organisasi serta mengkomunikasikan misi dan nilai-nilai organisasi, di samping manfaat lainnya.

Terlepas dari pro dan kontra pemanfaatan COMET di internal BPPK, untuk memasyarakatkan pemanfaatan COMET oleh seluruh pegawai BPPK, kami mengajak para pegawai BPPK yang aktif di media sosial untuk menjadi pelopor serta membangun forum Bidang TIK untuk mendiskusikan hal-hal terkait pengembangan COMET lebih lanjut, di samping isu-isu terkait TIK lainnya yang dianggap menarik oleh warga COMET.

Bagaimana efektivitas konsep media sosial yang digunakan oleh COMET?

Strategi media sosial yang kami tempuh ini ternyata cukup efektif dalam menumbuhkembangkan minat pegawai BPPK untuk secara perlahan mulai memanfaatkan COMET sebagai salah satu media dalam berkomunikasi dan berkoordinasi. Sejumlah forum mulai tumbuh, khususnya menyangkut masalah bidang Keuangan, Kepegawaian, Aset, dan Keorganisasian, di samping forum-forum terkait kediklatan lainnya.

Sebagai bagian dari strategi



pengembangannya, COMET juga dirancang untuk tidak pernah mencapai bentuk yang paripurna sehingga memungkinkan dirinya untuk terus berkembang sejalan dengan kebutuhan dan tuntutan warga COMET dan BPPK. Saat ini, di samping bermunculan menu-menu baru yang tidak ada pada versi awal, COMET juga mengintegrasikan seluruh aplikasi internal yang digunakan di lingkungan BPPK, sehingga sangat memudahkan pegawai dalam bekerja (*one stop service concept*).

Pengembangan COMET selanjutnya?

Untuk tujuan yang lebih tinggi, setahun setelah COMET dibangun, kami bersama rekan-rekan di Bagian TIK BPPK mengembangkan konsep pemanfaatan COMET, baik untuk kepentingan internal Kemenkeu, maupun eksternal. Secara umum, COMET dikembangkan untuk *Mengawal Kebijakan Menteri Keuangan Menggunakan Pendekatan Komunitas Berbasis Media sosial*.

Kami meyakini bahwa adalah sangat sulit merancang sebuah kebijakan yang efektif, namun jauh lebih sulit untuk memastikan efektivitas implementasi kebijakan tersebut di lapangan. Kita juga sangat paham bahwa untuk memastikan efektivitas implementasi kebijakannya, Kementerian Keuangan selama ini telah memiliki berbagai saluran komunikasi yang efektif dengan para stakeholder-nya, mulai dari website hingga call center. Hanya saja, karena sifatnya, kebanyakan bentuk komunikasinya bersifat *one-on-one*, sehingga jumlah stakeholder yang dapat dilayani dalam satu waktu tertentu relatif terbatas.

Di sini kami sangat berharap bahwa COMET dapat hadir sebagai *channel komunikasi alternatif* dan sejalan dengan amanat UU tentang Keterbukaan Informasi Publik serta memungkinkan komunikasi yang lebih efektif dan interaktif dengan seluruh *stakeholders* Kementerian Keuangan.

Bagaimana COMET mengakomodir kepentingan penggunanya?

Karena sifatnya pula, komunikasi via COMET dapat berlangsung secara *one-to-many* bahkan *many-to-many* bahkan sangat besar peluangnya COMET dapat dimanfaatkan untuk membangun knowledge base di bidang keuangan negara yang dapat dijadikan acuan bagi para stakeholder dalam meningkatkan pemahamannya terhadap aturan-aturan tertentu di bidang keuangan negara.

Dengan demikian, rasanya tidak berlebihan jika kami berharap bahwa COMET dapat dimanfaatkan untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan Menteri Keuangan tersosialisasi secara cepat, seragam, efektif, efisien, menyeluruh, dan berkesinambungan kepada seluruh stakeholder terkait yang tercermin pada peningkatan tingkat kepatuhan para stakeholder pada kebijakan tersebut serta membentuk dan menggiring opini publik agar sejalan dan seiring dengan tujuan penetapan kebijakan.

Di samping itu, komunikasi dua arah yang dibangun secara terkendali membawa harapan bahwa Kementerian Keuangan akan memperoleh feedback dari para stakeholder yang akan dimanfaatkan bagi upaya pengembangan kebijakan dan strategi implementasi kebijakan yang lebih baik.

Pendekatan yang digunakan oleh COMET?

Pendekatan Komunitas yang kami gunakan tentunya sejalan dengan konsep media sosial pada COMET. COMET, seperti juga media sosial lainnya, mengandalkan fitur *Social Engagement* sebagai perekat antar para member, dimana para member dapat melakukan aktivitas layaknya menggunakan aplikasi facebook, seperti update status, memberi komentar, menambah teman, dan menulis di *wall* teman. Fitur ini menurut hasil

pengamatan kami menjadi salah satu alasan utama mengapa para member setiap hari membuka aplikasi COMET, di samping untuk mengecek apakah ada informasi terbaru dari pihak lembaga yang mungkin bermanfaat bagi mereka. Fitur Sosial Engagement ini lah yang membuat forum-forum diskusi di COMET relatif lebih aktif di banding forum internal yang sejenis.

Untuk lingkup Kementerian Keuangan, pendekatan komunitas ini masih sangat relevan, mengingat para stakeholder atau Warga Kementerian Keuangan pada dasarnya adalah semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung terpengaruh/berkepentingan atas kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Jika kita kelompokkan, maka Warga Kemenkeu ini dapat kita bagi atas 3 kelompok besar, yaitu Pegawai Kemenkeu, Pegawai K/L/Pemda, dan Warga Masyarakat dalam dan luar negeri.

Manfaat COMET bagi Kemenkeu?

Komunitas yang dibangun melalui COMET ini akan menghadirkan sejumlah potensi manfaat yang dapat dipetik, baik untuk lingkungan internal maupun eksternal Kemenkeu. Adapun potensi manfaat untuk lingkup internal Kemenkeu, antara lain, terciptanya saluran komunikasi dan koordinasi alternatif yang bersifat “kurang formal” namun efektif antar pegawai dan pejabat di lingkungan kementerian keuangan (*better communication and better social engagement throughout the ministry*) yang pada gilirannya akan membantu Kementerian Keuangan dalam mengkomunikasikan visi, misi, serta program kerjanya secara internal, membantu upaya meminimalisasi silo-silo antar unit eselon I di lingkungan Kemenkeu, serta dapat dimanfaatkan sebagai sarana *talent scouting*.

Di samping itu, terbangunnya komunitas internal ini juga sangat berpotensi untuk mendukung upaya pengembangan konsep “diklat berkesinambungan”,

termasuk diklat yang bersifat OJT (*On the Job Training*) dan upaya pengembangan *knowledge base* di bidang keuangan negara, di samping itu, fitur-fitur yang tersedia pada COMET memungkinkan Kementerian Keuangan untuk menyederhanakan sekaligus memperluas ruang lingkup proses Identifikasi Kebutuhan Diklat (IKD) dengan melibatkan sebanyak mungkin warga Kemenkeu.

Potensi manfaat lain dari terbangunnya komunitas melalui COMET adalah untuk memudahkan Kemenkeu dalam mengembangkan jaringan dengan sebanyak mungkin tenaga pengajar potensial dari seluruh unit kemenkeu di seluruh Indonesia.

Adapun secara eksternal, pembangunan komunitas via COMET setidaknya akan memberi manfaat antara lain berupa kemudahan dalam menjaring sebanyak mungkin tenaga ahli di berbagai bidang keilmuan dan keterampilan dari seluruh satker di lingkungan K/L/Pemda dalam rangka pengembangan kebijakan terkait, juga kemudahan bagi Kemenkeu dalam sebanyak mungkin informasi tentang permasalahan seputar penyelenggaraan keuangan negara yang pada akhirnya akan membantu dalam merancang program kerjanya yang efektif, serta membantu mengawal, mengkomunikasikan, dan mensukseskan program dan kebijakan Kementerian Keuangan, baik di lingkungan K/L/Pemda maupun masyarakat di dalam dan luar negeri (perpajakan, anggaran, perbendaharaan, bea cukai, dll) dalam rangka mendukung/mensukseskan upaya membangun *good governance* bidang keuangan negara.

Agar potensi manfaat tersebut di atas dapat benar-benar terwujud, kami sangat berharap agar pada 2014 ini COMET juga dapat diterima dan dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh warga Kemenkeu khususnya dalam meningkatkan kualitas

komunikasi dan koordinasi antar pegawai dan antar unit di lingkungan Kemenkeu.

Langkah pengembangan COMET selanjutnya?

Dengan suksesnya pemanfaatan COMET secara Kemenkeu-Wide, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa pada 2015 nanti COMET versi eksternal akan menyusul diluncurkan guna mengakomodasi kebutuhan komunikasi dan koordinasi Kementerian Keuangan dengan Kementerian dan Lembaga Pemerintah lainnya serta dengan seluruh pemda, sebelum akses untuk masyarakat di buka secara luas pada 2016.

Model yang kami kembangkan ini memang bukan model yang biasa, bahkan bisa jadi media komunikasi yang kami beri nama COMET ini merupakan yang pertama dan satu-satunya di

lingkungan pemerintah. Suksesnya COMET di lingkungan BPPK amat sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh warga BPPK, saat ini bahkan kami dapat mengatakan bahwa COMET dibangun oleh Bagian TIK Sekretariat BPPK, namun dikembangkan dan dibesarkan oleh seluruh warga BPPK.

Demikian juga harapan kami nantinya ketika COMET atau apapun namanya kelak diterapkan untuk lingkungan Kemenkeu, baik internal maupun internal, sukses atau tidaknya amat sangat ditentukan oleh partisipasi aktif seluruh warga Kemenkeu dalam memanfaatkannya. Mari bersama-sama memberi makna baru bagi istilah "Keterbukaan Pemerintah" melalui pemanfaatan COMET dalam berkomunikasi dan berkoordinasi dengan seluruh warga Kemenkeu, baik internal maupun eksternal. Semoga Sukses!!

Foto: Eros L. Mursalin



Tim Pengembang COMET
dari kanan ke kiri: Iqbal Soenardi, Suharyadi, Arif Mulyono, Wawan Ismawandi



Foto: Eros L. Mursalin

Sinergi Menyongsong Basis Akruwal Pelaporan Keuangan

Oleh: Wawan Ismawandi

“PPAKP tahun ini khusus dalam rangka menyiapkan satker-satker membuat laporan keuangan berbasis akrual”, demikian salah satu kalimat pembuka dalam diskusi kami dengan Kepala Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan BPPK, Syamsu Syakbani.

Tahun 2014, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan melalui Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan kembali melaksanakan salah satu program nasional yaitu Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP). Sebelumnya, program yang diprakarsai oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu tersebut

telah dimulai sejak tahun 2007, dan telah mendidik tidak kurang dari 30 ribu pegawai di Kementerian/Lembaga di seluruh Indonesia. Sedangkan pada tahun 2014, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, melalui Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan (Pusdiklat AP) diberikan wewenang dan tanggungjawab untuk melakukan lanjutan rangkaian pelatihan terkait PPAKP ini. Khusus untuk tahun ini, materi akan difokuskan kepada penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Hal ini sesuai dengan adanya PP 71/2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah yang menyebutkan bahwa untuk tahun 2015 pemerintah harus

melaksanakan akuntansi berbasis akrual. “Adanya amanat UU dan PP 71 tersebut yang membuat kami mendesain sebuah workshop khusus untuk menyiapkan SDM yang memahami mengenai sistem akuntansi berbasis akrual”, begitu diungkapkan oleh Kusmono, Kabid Perencanaan dan Pengembangan Diklat, Pusdiklat AP.

Workshop ini terencana, terbentuk, dan terlaksana berkat adanya sinergi yang baik antara BPPK dan Ditjen Perbendaharaan. BPPK sebagai lembaga diklat mempunyai peran sentral dalam hal mendesain kurikulum, mengemas, dan memberikan materi pelatihan.

“

Workshop ini terencana, terbentuk, dan terlaksana berkat adanya sinergi yang baik antara BPPK dan Ditjen Perbendaharaan

”

Di sisi lain, dukungan penuh para pimpinan, masukan materi dari para praktisi dan narasumber di Ditjen Perbendaharaan, melengkapi sinergi untuk terlaksananya workshop ini.

Pusdiklat AP tidak setengah-setengah dalam mempersiapkan workshop ini. Workshop Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dan Aplikasi SAIBA, demikian nama kegiatan ini, telah melewati berbagai persiapan, antara lain koordinasi internal tim teknis BPPK, koordinasi tim teknis BPPK dan Ditjen Perbendaharaan, koordinasi tingkat nasional sampai koordinasi pelaksanaan tingkat daerah pun sudah dilakukan. Dari sisi akademis, penyusunan kurikulum yang tepat, penyiapan tenaga pengajar yang terstandarisasi, penyiapan peserta sampai dengan alat ukur untuk mengevaluasi efektifitas pembelajaran juga sudah disiapkan.

Tidak ketinggalan, penyusunan kurikulum dipersiapkan dengan matang dengan membagi pada tiga jenis kurikulum, yaitu kurikulum untuk pengajar akuntansi akrual, kurikulum untuk pengajar aplikasi SAIBA dan kurikulum untuk satker (*end user*). Tiga jenis kurikulum tersebut terkait dengan keseriusan Pusdiklat AP dalam mempersiapkan pengajar. Dalam mempersiapkan pengajar, standardisasi kompetensi baik dari segi penguasaan substantif materi maupun metode mengajar (*micro teaching*) menjadi hal mutlak. Sehingga bukan hanya kedalaman materi yang harus dikuasai pengajar, tetapi juga teknik dalam mengajar yang baik juga harus dikuasai oleh pengajar. Hal ini dilakukan agar ratusan pengajar yang akan memberikan pelatihan kepada sekitar 3800-an peserta ini mempunyai kapasitas dan kompetensi mengajar yang

sama, sehingga siapapun pengajarnya, dimanapun kelas dan lokasinya akan menghasilkan hasil yang sama pula.

Standardisasi tenaga pengajar dilakukan dengan beberapa langkah, diawali dengan mengidentifikasi para ahli dibidangnya sebagai pengajar pada workshop, untuk kemudian dilakukan *Training for Master Trainer* (TFMT). Kemudian bagi calon pengajar, dilaksanakan *Training of Trainer* (ToT) Penyegaran (bagi pengajar yang pernah mengajar pada PPAKP sebelumnya), dan ToT pengajar (bagi pengajar yang belum pernah mengajar pada PPAKP sebelumnya).

Ada yang menarik dari seleksi pengajar ini yaitu digunakannya ujian bagi tenaga pengajar agar memenuhi standar kualifikasi yang sudah ditetapkan. “Ada beberapa pengajar yang tidak memenuhi kualifikasi, tidak lulus, sehingga terpaksa tidak diikutkan ke dalam tim pengajar workshop ini”, ujar Budi Bahagiato. “Pengajarnya berasal dari BPPK, Kanwil DJPBN dan KPPN yang berada di lokasi pelaksanaan diklat”, lanjut Kasubbid berkacamata ini yang menangani tenaga pengajar ini.

Materi yang disampaikan pada workshop berdurasi empat hari ini antara lain Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat, Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual, Bagan Akuntansi Standar, Jurnal Standar dan Simulasi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual serta Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAI-BA).

Setelah mengikuti workshop ini, para peserta diharapkan mampu menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) berbasis akrual, baik secara manual maupun menggunakan aplikasi. Dalam pelaksanaannya, workshop ini tidak langsung digulirkan secara *massive*

kepada peserta, namun workshop ini diujicobakan terlebih dahulu untuk beberapa kelas. Setelah dilakukan evaluasi keseluruhan atas ujicoba tadi, penyelenggara menyebutnya dengan *piloting*, keseluruhan materi dan model proses pembelajaran akan disempurnakan berdasarkan hasil evaluasi tadi. Setelah dilakukan evaluasi untuk *piloting*, maka workshop akan digelar di 13 provinsi yang akan dilaksanakan di KPPN setempat. Pesertanya sendiri berasal dari wilayah kerja dari KPPN lokasi diklat.

Pusdiklat AP menyadari bahwa untuk tahun ini, belum dapat menjangkau seluruh pegawai di semua satker seluruh Indonesia. Oleh karena itu, sebagai wujud tanggungjawab untuk menyebarluaskan pengetahuan mengenai sistem akuntansi berbasis akrual ini, seluruh materi juga akan disediakan pada portal BPPK yang dapat diunduh oleh semua orang yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual pada akuntansi pemerintahan. Selain itu, dengan adanya pengajar yang sudah diseleksi dan tersebar di beberapa KPPN, memberikan kesempatan kepada para operator di satuan kerja untuk bisa berkonsultasi atau bertanya mengenai sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual ini.

“Semoga sinergi BPPK dan Ditjen Perbendaharaan ini serta pelayanan kami dalam bentuk penyebaran pengetahuan dan ketrampilan dalam workshop ini dapat memberikan andil positif bagi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara”, ungkap Kusmono menutup diskusi di kota Bogor tersebut.

CET : Tulang Punggung Operasional DJBC

Oleh: Shera Betania



Foto: Shera Betania

Berpakaian hitam-hitam, lengkap dengan senjata laras panjang dan sepatu boot. Mereka berjalan mengendap-endap melewati rumput-rumput tinggi. Sebuah tempat yang ditengarai tempat pembuatan pita cukai palsu menjadi sasarannya. Seketika, pintu didobrak. Teriakan bersahut-sahutan “Diam, jangan bergerak!”, disambut dengan suara letusan dari senapan laras panjang. Penyergapan dilakukan, namun tersangka kabur dari lokasi kejadian. Pasukan mengejar hingga ke atas bukit, akhirnya pelaku berhasil ditangkap.

Itulah sekelumit cerita dari Diklat

Custom Enforcement Training (CET) yang saat ini bernama DTSS Penindakan Kepabeanan dan Cukai. Berada di kawasan Ciampea, Bogor, para siswa melakukan simulasi dari sedikit materi diklat yang telah mereka peroleh. Siswa diklat, yang kesemuanya pria ini, terdiri dari DTSS Penindakan kelas Reguler dan *Workshop* Penindakan kelas Eksekutif. DTSS kelas Reguler dilaksanakan selama lima minggu dan diikuti oleh para pelaksana yang dalam tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari melakukan tugas teknis lapangan di bidang penindakan dan pengawasan. Sedangkan *Workshop* Penindakan kelas Eksekutif diikuti oleh para pejabat di

lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang terkait dengan penindakan dan pengawasan, yang dilaksanakan selama satu minggu. Perubahan nama tersebut seiring dengan pengalihan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang secara keseluruhan, mulai tahun ini, dilaksanakan oleh Pusdiklat Bea dan Cukai.

Jika kita lihat di banyak media massa, DJBC beberapa kali menjadi sorotan karena keberhasilannya dalam menggagalkan tindakan ilegal (penyelundupan) yang masuk ke Indonesia. ‘Bea Cukai Kepri Berhasil Gagalkan Penyelundupan Beras’ (Inilah.

com tanggal 7 Maret 2014), 'DJBC Sumut Berhasil Gagalkan Penyelundupan Bawang' (globalsumut.com tanggal 18 Maret 2013), atau 'Bea Cukai Juanda Gagalkan Penyelundupan Shabu senilai Rp1,32 Miliar' (bisnis.com tanggal 18 Maret 2014) adalah beberapa contoh judul *headline* berita yang mengangkat prestasi DJBC.

Seiring bergabungnya Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada 2015, Kementerian Keuangan menilai peran Ditjen Bea dan Cukai akan semakin besar guna mengawasi perdagangan ilegal baik di perkotaan yang sarat kemajuan, maupun daerah perbatasan. Oleh karena itu pengawasan harus diperkuat di segala segi, karena telah menjadi isu utama seiring masuknya Indonesia di dalam MEA tersebut. Di satu sisi target penerimaan negara yang menjadi tanggung jawab DJBC juga semakin meningkat, sehingga harus disadari bahwa tugas Ditjen Bea dan Cukai sangat beragam namun tetap harus berjalan beriringan, selaras, dan seimbang. Target penerimaan bea dan cukai meningkat setiap tahunnya dan dalam APBN 2014, target penerimaan dari bea dan cukai dipatok sebesar Rp170,2 triliun.

Tantangan yang terus dan akan dihadapi oleh DJBC menuntut pengawasan tinggi terhadap arus barang, orang, ataupun dokumen yang masuk maupun keluar dari wilayah Indonesia, baik melalui darat, laut, dan udara. Petugas atau pegawai yang handal dan menguasai pengetahuan, keahlian dan keterampilan di bidang pengawasan dan penindakan menjadi syarat mutlak dalam menekan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Pusdiklat Bea dan Cukai melihat kebutuhan DJBC dalam pengembangan kompetensi pegawai lapangan untuk dapat mengatasi banyaknya tantangan yang datang silih berganti. Kemampuan untuk meneliti, mengawasi serta menindak adalah hal dasar yang diajarkan dalam diklat ini. "Tugas bea dan cukai itu salah satunya adalah *community*

protection. Memang *enforcement* ini menjadi tulang punggung operasional DJBC kedepannya", tutur Kepala Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanaan dan Cukai DJBC, Oentarto Wibowo.

Melihat tuntutan dan tanggungjawab yang ditanggung oleh DJBC, Pusdiklat Bea dan Cukai sebagai penganaman dalam pengembangan SDM pegawai DJBC, melaksanakan DTSS dan *Workshop* Kepabeanaan dan Cukai. Diklat ini bertujuan untuk memberikan pembekalan kemampuan pengawasan dan penindakan bagi para pegawai dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, terutama yang berhubungan langsung dengan kegiatan pengawasan. Beberapa materi yang diberikan dalam diklat ini antara lain materi dasar-dasar pengawasan, intelijen dan pra penindakan, teknis penindakan darat, laut dan udara, teknis komunikasi dan psikologi pemeriksaan, yang kesemuanya menitikberatkan pada praktek. Pusdiklat Bea dan Cukai berkoordinasi secara aktif dengan DJBC dan beberapa pihak terkait lainnya, seperti dengan Kopassus dan PT. Peruri dalam memberikan pedoman-pedoman pelaksanaan tugas. "Koordinasi dengan Pusdiklat BC sangat bagus, dalam setiap kegiatan diklat, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, secara informal pun sudah saling kontak, sehingga yang sifatnya operasional bisa saling membantu. Ini suatu sinergi yang sangat bagus sekali, dan kami berterima kasih", demikian disampaikan Oentarto Wibowo, yang pernah mengikuti diklat serupa di tahun 2013.

Hal senada disampaikan pula oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Pusdiklat BC, Sinung Prabowo. Sinung mengatakan bahwa DJBC sangat membantu dan mendukung terselenggaranya diklat dan *workshop* Penindakan ini. DTSS dan *Workshop* Penindakan Kepabeanaan dan Cukai sebelumnya dilaksanakan oleh DJBC dengan bantuan Pusdiklat Bea dan Cukai. Mulai tahun ini, secara utuh penyelenggaraan diklat dilaksanakan

oleh Pusdiklat Bea dan Cukai. Hal itu membuktikan bahwa kerjasama dan kepercayaan yang saling mendukung adalah hal mendasar agar kegiatan pengembangan sumber daya manusia dapat secara maksimal dilaksanakan. Sinung juga menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya, diklat dan *workshop* ini berjalan dengan sangat baik. Mulai dari peserta, pelatih dan penyelenggara, semuanya bersinergi. Kedepannya, Sinung berharap agar koordinasi yang telah tercipta dengan baik selama ini dapat dipertahankan.

Oentarto menyampaikan harapannya agar diklat seperti ini dapat di eskalasi ke tingkat Kementerian. "Ini kan tidak semata-mata tembak-tembak, tidak semata-mata beladiri, tidak semata-mata pemberantasan penyelundupan, tetapi ada *team building* termasuk juga kebugaran", ujarnya disela-sela upacara penutupan diklat dan *workshop* ini. Ia berharap, jika diklat ini bisa dibawa ke level kementerian, para peserta yang berasal dari berbagai unit di Kemenkeu, diwajibkan untuk mengikuti tes kebugaran terlebih dahulu. "Untuk program atau diklat unggulan bisa kita naikkan ke Kemenkeu lalu kita tawarkan kepada kepala KPP, kepala KPKNL, kepala KPPN, eselon 3 yang staf, atau kepala kantor", imbuhnya.

DTSS dan *Workshop* Penindakan Kepabeanaan dan Cukai adalah salah satu diklat yang krusial bagi DJBC karena di dalamnya terdapat ilmu yang secara langsung memberikan dampak bagi Negara, terutama di sektor pengawasan dan penerimaan Negara. Para peserta yang telah mengikuti diklat ini diharapkan mampu menjadi petugas-petugas DJBC yang profesional di bidang penindakan kepabeanaan dan cukai, yang tangguh, profesional, dan mampu mengantisipasi perkembangan pelanggaran yang terus meningkat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, serta modus yang digunakan.

Kerja Keras dan Pantang Menyerah Kunci Sukses Ririn Mardiyani

Kerja keras dan menolak untuk menyerah merupakan tabiat utamanya. Dengan semangat ini, ia mendorong dan mengajak semua unsur di Balai Diklat Keuangan Yogyakarta untuk bersinergi dan memberikan pelayanan yang sempurna bagi semua stakeholdernya. Sosok yang disegani, bukan karena jabatannya, namun karena kehadirannya selalu memberikan solusi bagi semua pegawai di lingkungannya yang datang membawa permasalahan.

Oleh: Yohana Tolla



Foto: Eros L. Mursalin

Bermula di Tawangmangu, kota kecil di kaki Gunung Lawu yang terletak 40 Km sebelah timur dari kota Surakarta, Ririn Mardiyani mengawali langkahnya di dunia sebagai anak ke empat dari enam bersaudara. Putri dari seorang polisi ini menghabiskan masa kecilnya di kota ini. Sosok ibu merupakan tokoh sentral dan motivator utama yang menurunkan sifat pekerja keras dan pantang menyerah. “Ibu saya nih orangnya gigih”, kenangannya. Sejak kecil Ririn sudah menyaksikan bagaimana keras dan gigihnya perjuangan sang ibu untuk membiayai dan membesarkan Ia dan saudara-saudaranya. Tahun 1977, Ririn kecil masih duduk di bangku Sekolah Dasar, bapaknya pensiun dari dinas di kepolisian. Ibunya yang menjadi tulang punggung keluarga itu. Ibunya memiliki toko dan berdagang perhiasan berlian. Usaha itu dilakoni setiap hari berdagang, dari pagi hingga malam. Terkadang bahkan harus menumpang mobil pengangkut sayuran karena tidak ada kendaraan pulang. Ketika itu, Ririn kecil dan saudara-saudaranya belum tahu bagaimana beratnya perjuangan sang ibu. “Kita selalu nungguin ibu pulang semalam apapun, karena kita tahu ibu pasti selalu bawa oleh-oleh, bisa kue atau apapun *gitu*. Ada yang ditunggu”, lanjutnya. Kerja keras sang ibu melalui usaha kecilnya itu yang akhirnya menghidupi mereka setelah ayahnya pensiun. Selain untuk memperbaiki tempat tinggal, usaha kecil tersebut juga berguna untuk membiayai pendidikan anak-anaknya. Sang ibu memegang teguh prinsipnya bahwa semua anak-anaknya harus sekolah. Kegigihannya membuahkan hasil, hampir semua anak-anaknya berhasil lulus dari perguruan tinggi.

Pendidikan dasar dari ibu dua anak ini diselesaikan di Tawangmangu. Semasa sekolah, ia dikenal sebagai anak yang ceria, aktif, mudah bergaul, dan juga berprestasi. Semasa SD-SMP selalu masuk dalam barisan tiga besar. “Saya masih ingat, dulu saya dengan kedua teman saya, kami 3 orang terkecil di

kelas. Jadi ketika upacara, dan tidak sempat latihan untuk para petugas upacara, ya kami ditunjuk jadi petugas bendera, gak usah latihan juga sudah pasti bisa,” ceritanya. Selain baris-berbaris, ia juga suka mengikuti kegiatan olahraga. Walaupun tidak selalu menjadi juara, tapi ia termasuk bisa. Setelah lulus SMP ia melanjutkan ke SMA 1 Karanganyar, satu-satunya SMA negeri di Karanganyar kala itu. Karena merupakan sekolah favorit, hanya tiga siswa dari SMP-nya yang masuk ke sekolah itu, termasuk Ririn. SMA 1 Karanganyar inilah yang menghantarkan Ririn ke jenjang pendidikan tinggi, Universitas Gajah Mada. Jurusan Ekonomi Manajemen dipilihnya walaupun semasa SMA ia mengambil jurusan IPA. Ia merasa sejak awal kemampuan IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) nya lebih menonjol dibanding kemampuan di bidang IPA (Ilmu Pengetahuan Alam).

Perjuangannya dilanjutkan pada masa kuliah. Di pertengahan masa studinya, Sang Bunda menutup usia. Sosok Bunda yang sepanjang hidupnya menjadi satu-satunya motivasi penggerak untuk berprestasi tiba-tiba pergi menghadap Yang Mahakuasa. “Saat itu memang cukup berat untuk dijalani, *agak* goncang juga karena selama ini yang jadi motivator kita, ya Ibu. Tapi dijadikan sebagai tantangan”, ungkapinya. Kehilangan sosok seorang ibu menjadi pelecut semangat, ia bertekad untuk lulus kuliah bagaimanapun caranya. Berbekal beasiswa yang ia dapatkan, akhirnya di tahun 1992 ia berhasil menamatkan pendidikannya di UGM.

Perjalanan Karir

Selepas masa kuliah, Ririn menjadi asisten peneliti di almamaternya sembari mencari pekerjaan. Banyak tes penerimaan ia lalui, hingga akhirnya nasib membawanya ke Kementerian Keuangan. Awal tahun 1993 ia bergabung dengan BPLK (Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan – sebelum BPPK)

Kementerian Keuangan. Penempatan pertamanya adalah sebagai pelaksana pada Bagian Kepegawaian Sekretariat Badan, lalu pindah ke Bagian Organisasi dan Tata Laksana.

Perjalanan karir yang cukup lancar membawanya pada posisi Kepala Balai Diklat Keuangan (BDK) Malang di tahun 2009. Setelah mengalami beberapa posisi, baik sebagai pelaksana, koordinator pelaksana, kepala subbidang, dan juga beberapa unit kerja di BPPK, baik di kantor pusat maupun di balai, Ririn dianggap cukup cakap dalam memimpin sebuah kantor di lingkungan BPPK. Dalam menjalani berbagai posisi, tentu saja ada tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam menghadapi rekan kerja. Berhadapan dengan manusia dengan berbagai macam karakter. Ada yang susah, ada yang butuh *deadline*, ada pula yang mudah. Menghadapi hal tersebut ia berstrategi, suatu saat bisa tegas, dilain waktu bersikap halus. “Saya selalu bilang ke teman-teman, Saya galak, keras, harus disiplin. Tapi kalau kalian bisa ngikutin saya ya *gak* ada masalah. Kalau saya marah ya marah, tapi setelah itu selesai.

Jadi mereka sudah tahu”, tambahnya.

BDK Malang merupakan tempat yang menempa Ririn menjadi seorang pemimpin yang handal. Anak buah yang cukup banyak dengan berbagai macam karakter. Dua kali ditempatkan di BDK Malang, sebagai KKU. Di penempatan pertama, ia sudah kenal dengan tipikal rekan-rekan kerjanya. 10 tahun kemudian dia kembali ke Malang dengan posisi yang lebih tinggi, yaitu kepala balai. Sepuluh tahun berlalu sebetulnya komposisi pegawainya tidak banyak yang berubah, hanya beberapa saja yang baru. “Keadaan itu cukup melatih kesabaran dan emosi saya. Hanya memang kalau kita ditunjang dengan staf dan kepala seksi yang bisa *mensupport* kita itu enak, kalo *gak* memang repot”, ungkapnya. Tuntutan pekerjaan yang cukup banyak di balai butuh ditunjang dengan sumber daya manusia yang mumpuni. Peranan kepala seksi sangat penting, karena tidak mungkin segala permasalahan langsung ditangani oleh kepala balai. “Tapi *alhamdulillah* ketika di Malang saya dapat eselon 4 yang relatif bisa mengikuti langkah saya. Mungkin ada satu atau dua orang yang kurang, tapi kita kasih staf yang *mensupport* jadi agak bisa ngikutin langkah kita”, tambahnya.

Berlari. Istilah itu yang digunakan oleh Ririn dalam mengerjakan setiap pekerjaan yang diberikan kepadanya. Sifat ini ditularkan kepada semua staf yang mendukungnya. Sebagai pemimpin, Ririn mengajak anak buahnya untuk “berlari”. Diawal kepemimpinannya Ririn selalu menekankan kepada para staf di lingkungan kerjanya bahwa ia adalah orang yang memiliki ritme kerja yang cepat. “Saya pasti bilang bahwa memang saya orangnya *gak* bisa pelan, *gak* bisa menunggu, jadi semuanya harus cepat. *Deadlinenya* kapan itu memang harus dipenuhi”, katanya. Ia juga menanamkan kepada semua stafnya tentang pentingnya kerjasama, menjadi tim yang solid untuk bisa melayani *user*, mengingat *core bussiness* BPPK adalah menyelenggarakan diklat untuk melayani *user*. “Jadi ketika orang lihat balai diklat, ya ada itu berarti diklat disitu yang bisa melayani kebutuhan *user*”, tambahnya.

Mengaku sebagai orang yang perfeksionis, terkadang Ririn harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Ia merasa bahwa tidak semua staf dapat mengimbangnya untuk ikut ‘berlari’. Suatu waktu bahkan ia harus turun tangan sendiri agar pelayanan kepada stakeholder bisa berjalan dengan sempurna. “Saya tidak mungkin

menuntut orang untuk sama dengan saya”, ungkapnya.

Selain pekerja keras dan pantang menyerah, Ririn juga dikenal sebagai orang yang kreatif dan berani membuat terobosan. Dimanapun ia berada, ia berpikir bahwa seorang pemimpin itu harus kreatif, bisa mengajak anak buahnya untuk bisa bekerja dan bisa memenuhi tuntutan dari user dan stakeholder. Ia berpendapat jika hanya mengandalkan program-program yang ada ternyata tidak selalu bisa memenuhi keinginan dan kebutuhan user. Penyusunan program diklat dilakukan tetap berpegang pada aturan yang ada. Ia berjalan menurut koridor yang telah dibuat, apa yang bisa dikerjakan oleh BDK dan mana yang butuh koordinasi dengan pusat. “Saya tetap berpegang pada aturan, apa yang bisa kita kerjakan ya kita kerjakan, apa yang bisa dilakukan oleh balai, apa yang harus ijin ke pusdiklat. Saya juga selalu meminta masukan dari eselon 4 dari berbagai sisi. Kalau tidak ada masalah, saya tanya ke pusat, kemana saya harus minta izin kalau memang perlu izin ya saya lakukan”, imbuhnya. Program kediklatan yang boleh disusun oleh BDK adalah *workshop* dan seminar. Kedua program tersebut bersama-sama dengan staf yang ada ia susun sesuai dengan kebutuhan *user*. Setelah didesain, program tersebut diujicoba dan dievaluasi. Setelah berjalan dengan baik baru diterapkan secara massal.

Dalam menjalankan setiap kegiatan diklat yang dapat memenuhi kebutuhan *user* tentu saja butuh dukungan dari staf yang berkualitas. Menjaga agar motivasi dan gairah kerja para staf yang ada tentu dibutuhkan strategi tertentu. Oleh karena itu *reward* merupakan salah satu hal penting agar motivasi itu tetap terjaga. *Reward* bisa diberikan dalam bentuk materi atau hal lain. “Contohnya seperti pada waktu tahun kemarin, banyak *user* yang membutuhkan, terutama DJP, mereka *gak* mau diklat yang terlalu lama: untuk AR saya butuhnya ini, untuk penelaah keberatan



Foto: Eros L. Mursalin

butuhnya ini. Dan itu *gak* bisa terlalu lama, karena kalau terlalu lama mereka meninggalkan kantor nanti pekerjaannya gimana”, ceritanya. Keadaan itu ia sampaikan kepada widyaiswara dan bersama-sama menyusun kegiatan yang dapat mengakomodir kebutuhan tersebut. “*Nah* dengan begitu kita bisa memberikan *reward* ke widyaiswara dalam bentuk angka kredit dan honor, kalau ada honor. Karena kita keliling ke kantor-kantor di seluruh wilayah kerja kita di Jawa Tengah, mereka bisa ikut bergantian. Dan mereka dapat SPD walaupun *gak* banyak. Selain itu juga mereka dapat pengalaman baru, berhadapan dengan orang baru,” tambahnya.

Ririn juga mengajak anak buahnya untuk selalu meng-*upgrade* pengetahuan. Bisa melalui banyak cara, bisa melalui diklat, atau hal lain. Ilmu tersebut juga bisa ditularkan kepada peserta diklat yang datang ke BDK. Ia sampaikan juga bahwa mereka juga harus bisa meng-*upgrade* pengetahuan, karena ilmu itu nanti juga bisa berguna. Selain mereka dapat materi, mereka juga dapat menjalin jejaring kerjasama. Sambutan dari *stakeholder* cukup luar biasa. “Mereka *gak* punya kesempatan seperti kita ya, kita kan mau diklat apa saja istilahnya bisa, mereka kan *nggak*. Nah kita tularan ilmu tersebut”, ungkapnya. Selalu kreatif dalam menghadirkan program-program diklat yang variatif diyakini dapat lebih mempromosikan BDK dimata para *stakeholder*. Ririn bercerita, di masa awal ia menjabat sebagai eselon IV, ia kerap menemukan bahwa eksistensi balai diklat itu kurang diakui. Tidak semua warga Kementerian Keuangan tahu bahwa BDK itu adalah bagian dari keluarga besar Kementerian Keuangan. Salah satu cara “mengiklankan” BDK adalah dengan menghadirkan program-program diklat yang kreatif dan inovatif serta tepat sasaran. “*Nah* kalau sekarang ini, saya kalau boleh sombong, siapa *sih* yang *gak* kenal BDK Jogja di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah”, ungkapnya

disertai tawa.

Salah satu kepuasan kerja adalah bisa dikenal karena prestasi dan kinerja kita. Bagi balai diklat, kepuasan itu adalah bisa dikenal dengan program-program diklat yang memang bisa menunjang kinerja *stakeholder*. Kinerja BDK Yogyakarta akhirnya diakui dengan diundangnya Kepala BDK dan beberapa widyaiswara untuk hadir dalam Rakerda salah satu unit eselon I di Kemenkeu. Mereka diminta presentasi, lalu diberikan semacam penghargaan karena BDK dianggap sudah membantu peningkatan kinerja dengan program-program diklatnya. “Sebetulnya bukan penghargaan itu yang saya tekankan tapi suatu kehormatan bagi kami bahwa mereka mengakui keterlibatan BDK dalam menunjang kinerja mereka. Dan itu suatu kehormatan besar bagi kami bahwa kita diakui. Kita *tuh* berguna bagi mereka, jangan dipandang sebelah mata *lah*”, ungkapnya. Dengan begitu stigma yang selama ini melekat bahwa mengikuti diklat itu hal yang merepotkan perlahan-lahan menjadi hilang.

Menggal apa keinginan user menjadi hal yang penting agar dapat menghasilkan program diklat yang sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu dibutuhkan komunikasi yang intensif dengan para *stakeholder*. “Saya sering ngobrol, menanyakan tentang apa *sih* yang sebetulnya dibutuhkan oleh mereka, kalau AR (Account Representative) butuhnya apa, PK (Penelaah Keberatan) butuhnya apa. Dari situ kita dapat masukan tentang kebutuhan para *user*. Selain itu hubungan baik dengan Kanwil-kanwil dan kantor-kantor di wilayah kerjanya harus tetap dibina.

Di mata Ririn, BPPK sudah mengalami banyak perubahan dibanding sewaktu pertama kali ia bergabung. Kedepannya ia berharap BPPK bisa memiliki *bargaining power* yang lebih kuat. Ia mengharapkan BPPK bisa ‘memaksa’ seluruh unit eselon I di Kemenkeu untuk mengirim pegawainya mengikuti diklat di BPPK. Hal ini dimungkinkan

bila UU ASN sudah diterapkan, karena undang-undang tersebut mewajibkan semua Aparatur Sipil Negara untuk mengikuti diklat sebanyak 40 jam/tahun. Menghadapi hal tersebut, BPPK juga harus berbenah, menyiapkan diri semaksimal mungkin. Persiapan dilakukan di semua lini, terutama dari sisi SDM. “Kita bisa menunjukkan bahwa kita punya widyaiswara yang betul-betul *qualified*, memiliki kompetensi yang tinggi. Harus kita buktikan, bahwa kita, BPPK, bisa melayani semua kepentingan *user* di Kemenkeu”, tambahnya.

Bersama Keluarga

Padatnya aktivitas kantor tidak membuatnya lalai dalam hal mengurus keluarga. “Saya masih sempat masak setiap hari *loh*, minimal sarapan masih saya yang menyiapkan”, ungkapnya. Totalitasnya dalam berkarya diakuiinya berkat dukungan penuh dari keluarga. Dukungan itu terasa ketika perjalanan karir membawanya pada tempat tugas yang berjauhan dengan keluarga kecilnya, ketika ia bertugas di Jakarta ataupun di Malang. Perjalanan Jakarta-Yogyakarta atau Malang-Yogyakarta pun ditempuhnya untuk selalu berkumpul dengan keluarga.

Akhir pekan merupakan saat yang bisa dimaksimalkan untuk berkumpul bersama dengan keluarga, memberi perhatian lebih kepada anak-anak ketika di rumah. Kadang kedua anaknya suka protes bila Ririn sering pergi meninggalkan rumah untuk tugas ke luar kota. Protes itu diredam dengan mengajak mereka liburan. “Liburan itu biasanya makan, nonton. Kadang anak-anak minta karaoke. Kadang makan bersama atau berbelanja dengan yang kecil”, ungkapnya.

Ririn juga masih menyempatkan waktu untuk menjalankan hobi membacanya, walaupun tidak sering. Selain karena hobi, dengan membaca ia bisa meng-*update* pengetahuan untuk menunjang aktivitasnya di kantor. “Karena saya harus ceramah, harus ngomong didepan peserta diklat, perlu banyak membaca”, pungkasnya.



Win



**Powerbank dan
Suvenir Menarik!!**

Tebak Nama Gedung dan Lokasi Gedung berada pada unit BPPK mana kah gambar di atas. Tuliskan Jawaban serta Nama Lengkap dan Nama/Alamat Kantor berikut Nomor HP Anda. Kirim ke alamat Redaksi Media Edukasi dan Informasi Keuangan, melalui email ke ***edukasikeuangan@depkeu.go.id***.

Jawaban paling lambat kami terima ***31 Juli 2014***

Penentuan pemenang dengan cara di undi JIKA yang berhasil menjawab Tepat dan Benar lebih dari satu orang

Pengumuman Pemenang akan di umumkan pada Media Edukasi Edisi ke-23 (Bulan Agustus 2014)

Selamat!!!

Kepada Pemenang Kuis Edukasi Keuangan Edisi 21,

Nama : **Jhonliat Sinaga**

Unit Kerja :
KPP Madya Medan

Alamat :
**JL.SUKAMULIA NO 17-A
MEDAN**

(Kuis Edukasi Keuangan) tidak berlaku untuk semua Pengurus dan anggota serta keluarga Dewan Redaksi Media Edukasi Keuangan

Serambi Ilmu

- ▶ Pengaruh Komunikasi Interpersonal Terhadap Stres Kerja
- ▶ Are Tax Authority's Efforts in Increasing Compliance Adequate?
- ▶ Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Basis Akrual
- ▶ Audit for Public Budgeting Case: Regency or Municipality (Pemda) in Indonesia
- ▶ Manajemen Kelas: Cara “Menyenangkan” *Audience*



Pengaruh Komunikasi Interpersonal Terhadap Stres Kerja

Oleh: Rita Dwi Lindawati, SE, MPd -
Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai

Abstrak

Pernahkah Saudara merasa “bete” alias *badmood* dalam mengerjakan tugas-tugas di kantor? Atau pernahkah Saudara sulit mengendalikan emosi sehingga mudah marah di kantor? *Bete*, emosi, atau bahkan gangguan fisik seperti pusing dan mual yang muncul ketika Saudara bekerja disebabkan oleh banyak hal. Alasan berantai mulai dari masalah keluarga, masalah pribadi, beban kerja yang tinggi,

ketidakjelasan karier, ketidakjelasan petunjuk dan arahan dalam bekerja, memiliki partner kerja yang menyebalkan, atau atasan yang otoriter dan masih banyak lagi berbagai pemicu. Menurut Beehr and Newman seperti yang dikutip oleh Luthans (2011) mengatakan bahwa respon kita terhadap pemicu yang muncul ketika berinteraksi dengan lingkungan kerja atau dengan pekerjaan kita disebut stres kerja. Gangguan fisik dan atau gangguan psikis tersebut adalah indikator munculnya stres

kerja. Banyak faktor yang dapat menjadi pemicu stres kerja. Salah satunya adalah masalah komunikasi interpersonal.

Komunikasi Interpersonal

Komunikasi memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Watzlawick, Beavin dan Jackson seperti yang dikutip oleh Nina (2011) mengatakan bahwa “*we can not not communicate*”, bahkan pada saat kita berdoa sekalipun. Hal ini berarti bahwa setiap saat kita melakukan komunikasi. Banyak ahli yang mengartikan komunikasi, salah satunya adalah John Schermerhorn (2010) menyatakan bahwa komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan simbol yang bermakna. Simbol yang bermakna itu sering disebut pesan. Sedangkan pengertian komunikasi interpersonal yang dikemukakan oleh Ivancevich, Konopaske dan Matteson (2011) adalah komunikasi antara dua orang secara tatap muka langsung atau dalam kelompok. Devito (2007) mengatakan komunikasi interpersonal dapat dilakukan dengan tatap muka langsung atau dalam bentuk *online* (*email, mailing list, group instan messaging* atau dalam bentuk *chat group*). Komunikasi interpersonal yang akan penulis bahas dalam artikel ini adalah komunikasi interpersonal dalam lingkup komunikasi organisasi,

Dalam menjalankan tugas di kantor setiap pegawai pasti melakukan komunikasi interpersonal secara langsung (*face to face communication*) atau melalui berbagai media dengan teman sejawatnya. Dalam bekerja banyak hal yang harus kita komunikasikan dengan teman sejawat kita. Kita sering mendiskusikan tugas yang pelik, bertanya peraturan yang baru, menjelaskan prosedur suatu sistem dan memberi pertolongan kepada teman yang membutuhkan saran kita berkaitan dengan tugas. Tujuan setiap pegawai melakukan komunikasi tersebut adalah untuk mendapatkan penyelesaian masalah, penjelasan suatu prosedur, memahami peraturan yang baru (informasi baru) dan mendapat pertolongan dalam kesulitan kerja.

Stres Kerja

Menurut Wirawan (2012) stres merupakan reaksi yang tidak diharapkan yang muncul karena tingginya tuntutan lingkungan kepada seseorang. Menurut Selye, yang dikutip oleh Ashar (2008), “Stres adalah satu abstraksi. Orang tidak dapat melihat pembangkit stres (*stressor*). Yang dapat dilihat ialah akibat dari pembangkit stres”. Menambahkan yang dikutip oleh Ashar (2008), menurut Fincham & Rhodes, stres yang disimpulkan dari gejala-gejala dan tanda-tanda faal, perilaku, psikologikal dan somatik adalah hasil dari tidak/kurang adanya kecocokan antara orang (dalam arti kepribadiannya, bakatnya, dan kecakapannya) dan lingkungannya, yang mengakibatkan ketidakmampuannya untuk menghadapi berbagai tuntutan terhadap dirinya secara efektif. Menurut Sopiha (2008) stres ada dua macam yaitu *distress* (derajat penyimpangan fisik, psikis dan perilaku yang sehat) dan *Eustres* (pengalaman stres yang tidak berlebihan, cukup untuk menggerakkan dan memotivasi orang agar dapat mencapai tujuan, mengubah lingkungan mereka dan berhasil dalam menghadapi tantangan hidup). Artikel ini akan membahas mengenai *distress*.

Beberapa ahli telah mendefinisikan stres kerja diantaranya adalah Marc J. Scharbracc (2003), mengatakan stres kerja sebagai sebuah respon terhadap hilangnya kendali terhadap kinerja kita. Selanjutnya stres kerja diartikan sebagai tekanan yang terjadi ketika kita harus mengerjakan sesuatu yang tidak ingin kita kerjakan. Sauter et al, seperti yang dikutip Rae Andre (2008), berpendapat bahwa stres kerja adalah respon fisik dan emosional yang berbahaya yang terjadi ketika persyaratan pekerjaan tidak sesuai dengan kemampuan pekerja, sumber daya, atau kebutuhan. Richard L. Daft (2010) mengartikan stres kerja sebagai kesulitan, ketidaknyamanan, melelahkan dan bahkan menakutkan. Menurut Ivancevich dan Matteson, dalam buku Luthans (2011), mengatakan bahwa stres kerja sebagai sebuah respon adaptif (tanggapan penyesuaian) yang

dimediasi oleh perbedaan individu dan atau proses psikologi, sebagai akibat dari aksi lingkungan, situasi atau peristiwa yang menyebabkan tuntutan fisik dan atau psikologi secara berlebihan terhadap seseorang. Sedangkan Beehr and Newman, dalam buku Luthans (2011), mengartikan stres kerja sebagai sebuah kondisi yang terjadi sebagai hasil interaksi antara pegawai dengan pekerjaan mereka dan dikarakteristikan atau ditandai oleh perubahan manusia yang memaksa mereka untuk menyimpang dari fungsi normal mereka.

Berdasarkan uraian konsep stres kerja di atas, penulis dapat sintesakan bahwa stres kerja adalah respon adaptif seseorang terhadap tuntutan fisik dan atau psikologi terhadapnya sebagai akibat dari interaksinya dengan pekerjaan dan lingkungan kerjanya, berdasarkan indikator (1) tekanan; (2) kesulitan; (3) ketidaknyamanan; (4) kelelahan; dan, (5) ketakutan.

Pengaruh Komunikasi Interpersonal Terhadap Stres Kerja

Apa yang terjadi ketika pegawai tidak cukup mendapat informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan pekerjaannya? Menurut JR Carlson and R.W. Zmud, mengutip buku Ivancevich, Konopaske, dan Matteson (2011), mengatakan bahwa ketidakadaan informasi yang cukup yang terkait dengan pekerjaannya dapat menciptakan konflik dan stres di antara anggota organisasi. Ketiadaan informasi yang cukup, menyebabkan kesalahpahaman di antara anggota organisasi (sehingga terjadi konflik), sering terjadinya kesalahan dalam bekerja, ketidakmampuan menyelesaikan pekerjaan, yang itu semua merupakan indikator terjadinya stres kerja. Dari pernyataan tersebut dapat kita ketahui bahwa ketidaktepatan komunikasi interpersonal dapat menimbulkan stres kerja. Selain itu S.L. Langelaan, mengutip buku yang sama, mengatakan bahwa ada 4 faktor penting yang memberikan kontribusi terhadap *burnout* (kehilangan semangat kerja) yaitu beban kerja yang tinggi, batas

waktu penyelesaian pekerjaan, banyaknya larangan dan kertas kerja serta sedikitnya komunikasi dan umpan balik. Selain ke empat faktor penting tersebut masih ada faktor lain yang menyebabkan *burnout*, yaitu konflik peraturan dan ambigu, sulitnya hubungan antar pribadi dan sistem imbalan yang tidak didasarkan kinerja. Dari hasil penelitian tersebut menguatkan pemahaman bahwa komunikasi interpersonal berpengaruh terhadap stres kerja. Selain itu dapat kita ketahui bahwa semakin tepat komunikasi interpersonal maka menyebabkan semakin rendahnya stres kerja.

Disamping beberapa penelitian tersebut di atas, pengaruh komunikasi interpersonal terhadap stres kerja dapat kita lihat dari model perilaku organisasi dari Colquitt, LePine, Wesson (2011) pada gambar di samping.

Dari model tersebut dapat diketahui, bagaimana individu berkomunikasi dengan individu lain dalam kelompok (*group mechanisms*), akan berpotensi membentuk stres (*individual mechanisms*). Ketika dalam bekerja, individu tidak dapat berkomunikasi interpersonal dengan tepat, hal ini akan menimbulkan akibat negatif antara lain perasaan tertekan dan tidak nyaman dalam bekerja. Respon adaptif yang dilakukan oleh individu terhadap tekanan tersebut disebut stres kerja. Dari kondisi tersebut dapat diketahui bahwa komunikasi berpengaruh langsung terhadap stres.

Implikasi

Komunikasi interpersonal yang tepat dapat menyebabkan rendahnya stres kerja. Organisasi maupun setiap anggota organisasi seharusnya mengupayakan hal-hal yang dapat dilakukan untuk mendapatkan ketepatan komunikasi interpersonal dalam rangka mewujudkan rendahnya stres kerja. Agar lebih memperhatikan kebutuhan pegawai, organisasi dapat menggunakan beberapa cara menyangkut kebutuhan komunikasi interpersonal, seperti membuat Sistem Aplikasi Internal sebagai ajang diskusi pegawai melalui *Chat Group*, mengadakan

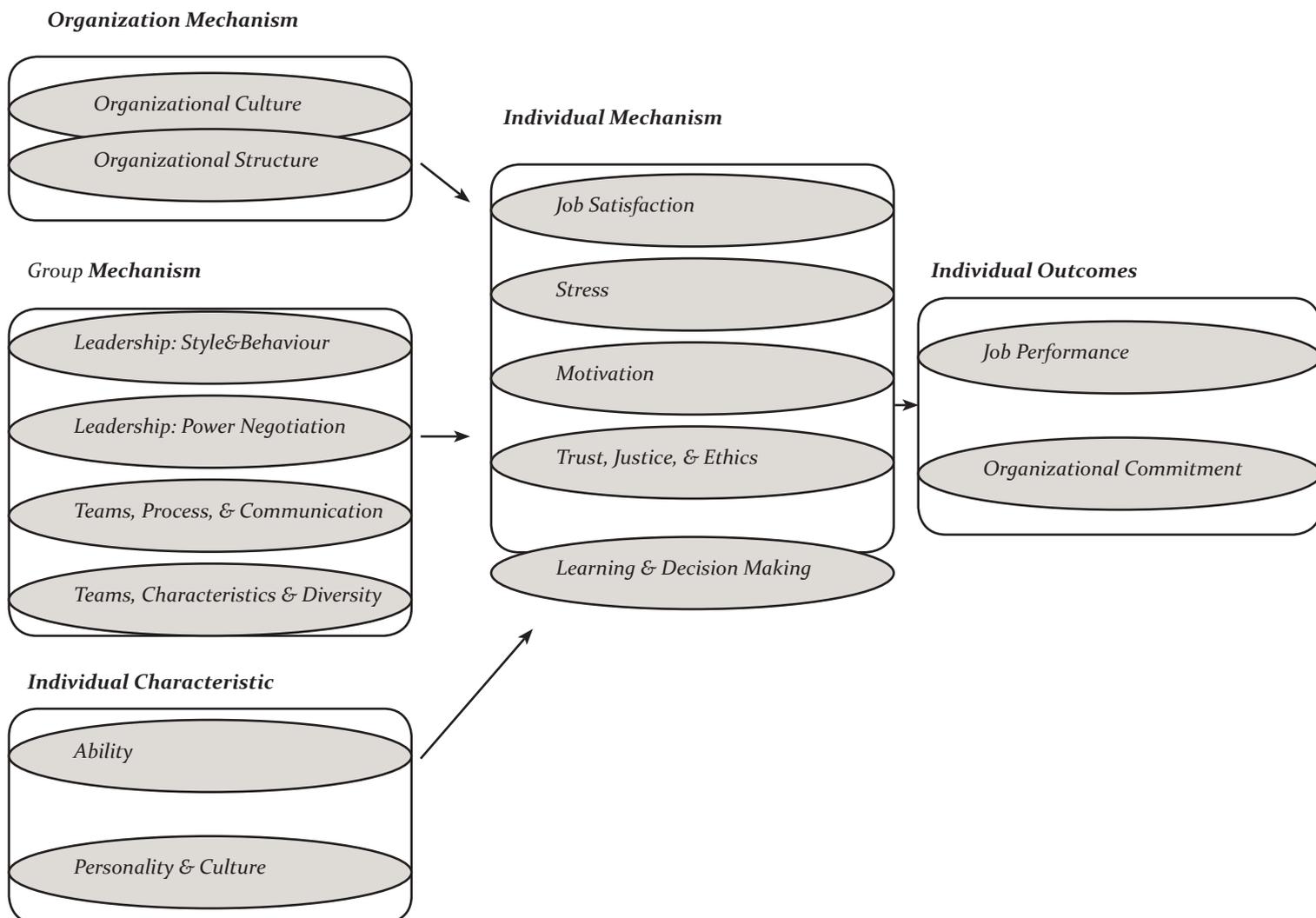


Diagram 1. *Integrative Model of Organizational Behavior.*

Sumber: Colquitt, LePine and Wesson, *Organizational Behavior*, 2011.

Coffee Morning per bidang untuk ajang diskusi pegawai, mengadakan pelatihan ketrampilan komunikasi interpersonal bagi pegawai dan menjadikan komunikasi sebagai bagian budaya organisasi. Bagi pegawai, agar dapat mengembangkan kompetensi dan wawasan, terutama yang berkaitan dengan cara melakukan komunikasi interpersonal secara tepat

seperti mengikuti pelatihan komunikasi interpersonal. Selain itu yang lebih penting adalah setiap anggota organisasi agar **mempraktekkan komunikasi interpersonal secara tepat** dalam kegiatan sehari-hari dalam organisasi. Hal itu mudah, hanya butuh kemauan yang kuat untuk mewujudkan !



Are Tax Authority's Efforts in Increasing Compliance Adequate?

Oleh: Kristian Agung Prasetyo -
Widyaiswara Pusdiklat Pajak

Taxation plays a major role in Indonesia. For the last six years, it has made up more than 70% of Indonesian revenue (Figure 1). In 2013, taxation was expected to contribute Rp 1,193 trillion (approximately A\$ 115.6 billion as of 13th March 2014) and this has been increased to Rp 1,289 trillion (A\$ 124.7 billion) in 2014. It is critical for this target to be met as most of Indonesia's national income depends on taxation.

It is important to note that Indonesia uses the self-assessment system in its tax administration. Under this structure, tax

revenue mostly depends on taxpayers voluntarily complying with the tax rules although it is the responsibility of the tax authority to ensure that taxpayers fulfil their duty correctly.

In this essay, it will be shown that, currently, the taxpayers compliance rate in Indonesia could be low. For this, firstly a comparison between potential and registered taxpayers and the number of taxpayers who lodge tax return will be described. Secondly, income reported by selected individual taxpayers to the Eastern

Tangerang tax office will be analysed as a case study to provide additional evidence of non-compliance. For this purpose, the first-order test of Benford's law will be carried out. Benford's law has been used to identify possible income tax evasion using data compiled by the Internal Revenue Service from unaudited individual tax returns in the United States. It will also be argued that even though taxpayers compliance is low, the current efforts of the Indonesian tax authority (the Directorate General of Taxes/ DGT) to increase compliance is inadequate.

In the Indonesian context, tax is defined as *'a compulsory contribution to the state ... without any direct benefit in return ... for the maximum welfare of the people'*. Consequently, it is logical to infer that most taxpayers are unwilling to pay taxes voluntarily as there is no direct gain resulting from the payments. Indeed, it is this view that forms the basis of the classic compliance model proposed by Allingham and Sandmo. Here, they argue that taxpayers in paying taxes have the intention to maximise their personal benefit and paying taxes is viewed as a cost-benefit approach. As taxes are viewed as costs, minimising them is without a doubt inherent in a taxpayers benefit-maximisation strategy under this framework. As a consequence, the model concludes that, without strict enforcement,

taxpayers compliance will remain low.

This seems to be true in Indonesia. As an indication, more than 41% of taxpayers, consisting of both individuals and corporations, did not lodge tax returns in 2007-2011 (Figure 2).

In the case of individual taxpayers, the Director of the Taxpayers Extension and Valuation of the DGT in a speech at the Financial Education and Training Agency in 2013 estimated that there is a potential to register more than 40.7 million individuals as taxpayers. However, to date, only 22.1 million individuals have been registered. This leaves more than 18 million persons unregistered and hence, do not pay income tax. The proportion of those who are registered and have lodged tax returns in the last three years, however, shows a decreasing trend (Figure 3).

Nevertheless, these statistics describe do not make any reference as to whether their contents are accurate. The accuracy of tax returns can be assessed using in-depth audits, as applied in the United States through the Taxpayer Compliance Measurement Program. Another technique that can be used to assess the accuracy of data is Benford's law. This method has been applied in various sectors including insurance, politics, and finance. It can also be used to assist in fraud detection in

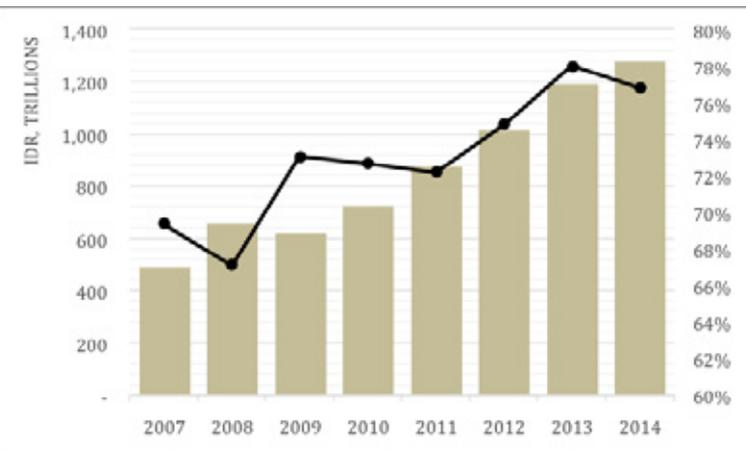


Figure 1 The role of taxation in Indonesia
Source: Ministry of Finance (2013 and 2014)



Figure 2 Filers vs Non-Filers
Source: DGT's Annual Report 2011

accounting data. Additionally, it has been applied to assess taxpayers compliance in the United States as numbers in a tax return generally conform to Benford's law.

This rule basically states that in a naturally-occurring number (a number that is not a result of deliberate manipulation), the probability of a number to appear in a certain position follows a pattern (Table 1). For example, the number 1 has a 30.10% probability to appear as the first digit or 11.39% as the second digit.

Additionally, Benford's law also covers the first two-digit test. Here, the expected frequency is calculated using the following equation:

$$P(D_1D_2) = P(D_1)P(D_2)$$

where D_1 , D_2 and d_1 , d_2 represent the digit order. For instance, the probability for 10 to appear as the first two-digit in a number is calculated as:

$$P(10) = P(1)P(0)$$

To assess the accuracy of the contents of tax returns, this essay uses the first-order test of Benford law. This test consists of the first, second, and the first-two-digit tests. The first-two-digit test is more

focused compared to the first digit and the second digit tests which are aimed towards identifying a general pattern only. The data to be used is taxable income reported to the Eastern Tangerang Tax Office by 1,734 by self-employed taxpayers in 2007.

The analysis was conducted in the following manner. Firstly, for the first digit-test, the first-digit numbers were extracted from the sample and their expected values were calculated. They are listed in column 2 and 3 of Table 2 respectively. For example, 1 appears 369 times as the first digit in the sample tax returns. This number is however expected to appear 521 times ($0.30103 \times 1,734$) as the first digit.

To see if the observed frequency conforms to the expected frequency, the chi-square test was carried out using Minitab 17. The result shows that at $\alpha=0.05$, the observed frequency resulting from the sample tax returns differs significantly from the expected frequency ($\chi^2(8, n=1,734) = 407.406, p=0.000$). This process was then repeated for the second digit (Table 3).

Here, 0 for example is observed 204 times as the second digit in the sample. This number

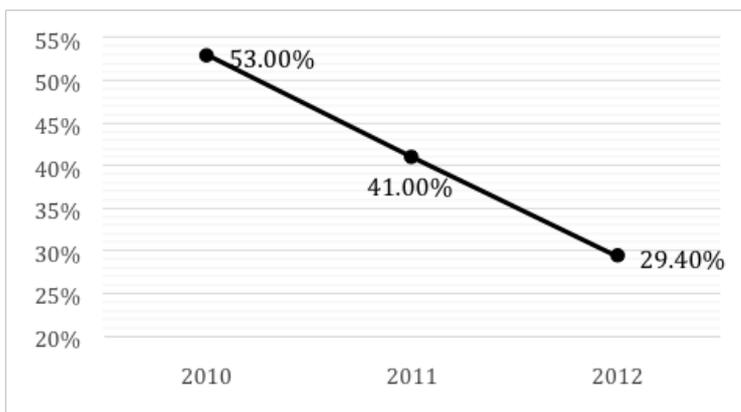


Figure 3 Tax return lodgement trend

Source: Director of the Taxpayers Extension and Valuation (2013)

Table 1 The expected digit frequencies

Number	Digit Position			
	1 st	2 nd	3 rd	4 th
0		0.11968	0.10178	0.10018
1	0.30103	0.11389	0.10138	0.10014
2	0.17609	0.10882	0.10097	0.10010
3	0.12494	0.10433	0.10057	0.10006
4	0.09691	0.10031	0.10018	0.10002
5	0.07918	0.09668	0.09979	0.09998
6	0.06695	0.09337	0.09940	0.09994
7	0.05799	0.09035	0.09902	0.09990
8	0.05115	0.08757	0.09864	0.09986
9	0.04576	0.08500	0.09827	0.09982

Source: Nigrini (1996)

is expected to appear 207 times (0.11968×1734). Unlike the first test, in the second-digit test, the chi square ($\alpha=0.05$) indicates that the sample conforms to Benford's law ($\chi^2(9, n=1,734)=16.0109, p=0.067$) although from the p value it can be seen that the fit is rather weak. Lastly, the first two digit is conducted. Here, the chi-square test reveals that the reported income sample deviates significantly from Benford's law estimation ($\chi^2(89, n=1,734)=595.008, p=0.000$).

This results of the first-order test of Benford's law as described in previous paragraphs provide an indication that deliberate tax evasion may have been taken place among self-employed taxpayers in Tangerang and present an additional evidence that non-compliance could be prevalent. It is therefore not surprising that the revenue contributed by self-employed taxpayers is much lower compared to the amount of taxes paid by employees whose taxes are withheld by the employers.

Thus, against this background, it is critical for the DGT to put more emphasis on increasing compliance. For this, there are several routes that can be taken. Firstly, compliance can be improved by increasing

the frequency of audits and the severity of the penalty. If it could be ensured that wrongdoers were mostly identified (through audits), combined with a severe penalty, tax revenue would be unquestionably high as compliance increased. Indeed, the result of an experiment conducted in 2010 at Institut Pertanian Bogor supports this premise.

In Indonesia, however, the frequency of special audits, which is aimed at assessing a taxpayers compliance, is low. For example, in 2009 the DGT conducted special audits covering only 0.040% of taxpayers. This proportion drops to only 0.016% in subsequent years (Table 4).

Furthermore, the Indonesian tax law requires all taxpayers who have overpaid taxes and therefore seek tax refund to be audited (referred to as routine audit). This rule has caused a situation where auditors pay more attention to routine audits as opposed to special audits. As an example, in 2009-2011 auditors only spent, on average, 10% of their auditing activities on special audits (Table 5).

This low proportion of special-audit means that there is a possibility that the DGT may

Table 2 Observed and expected 1st digit

Number	Digit		%	
	Observed	Expected	Observed	Expected
1	369	521.934	0.21280	0.30103
2	577	305.357	0.33276	0.17609
3	286	216.577	0.16494	0.12494
4	185	168.025	0.10669	0.09691
5	111	137.333	0.06401	0.07918
6	81	116.005	0.04671	0.06695
7	61	100.572	0.03518	0.05799
8	41	88.781	0.02364	0.05115
9	23	79.417	0.01326	0.04576
Total	1,734	1,734	1.00000	1.00000

Source: Eastern Tangerang Tax office (unpublished)

Table 3 Observed and expected 2nd digit

Number	Digit		%	
	Observed	Expected	Observed	Expected
0	204	207.525	0.11765	0.11968
1	186	197.485	0.10727	0.11389
2	203	188.694	0.11707	0.10882
3	144	180.908	0.08304	0.10433
4	186	173.938	0.10727	0.10031
5	162	167.643	0.09343	0.09668
6	157	161.904	0.09054	0.09337
7	163	156.667	0.09400	0.09035
8	180	151.846	0.10381	0.08757
9	149	147.390	0.08593	0.08500
Total	1,734	1,734	1.00000	1.00000

Source: Eastern Tangerang Tax office (unpublished)

have a lack of capacity to find wrongdoers. As a result, it could be difficult for compliance to be increased as evaders are less likely to be identified. Moreover, this situation could make the penalty system in the tax legislation ineffective since the DGT may have difficulties in identifying the possible offenders.

Alternatively, in addition to performing more audits, compliance could be increased by reducing the effective tax as it would reduce the benefits of evasion. This could possibly be achieved by decreasing the applicable tax rate or by providing a time frame in which taxes are significantly reduced (often referred to as tax holiday). In this regard, the Indonesian government has introduced a number of concessions such as increasing the tax-free income threshold for individual taxpayers from Rp 15.8 million p.a (approximately A\$ 1,530.58 as of 13th March 2014) to Rp 24.3 million p.a (around A\$ 2,353.99) for single taxpayers, a reduction in the corporate income tax rate

from 30% to 25%, and up to a 10-year tax holiday for eligible companies. These efforts could be effective in reducing the effective tax rate and therefore, may help increase compliance.

In conclusion, it can be seen that deliberate non-compliance could be prevalent in Indonesia. This may possibly be tackled by, firstly, conducting special audits more frequently. Coupled with a high penalty, this could lead to a high compliance level as it is likely that most taxpayers fear being audited and penalised. Secondly, compliance may rise if the benefit of evasion is reduced by decreasing the effective tax rate. This could be achieved for instance by offering concessions or statutory-rate reduction. Although Indonesia has responded sufficiently to the latter, the first, unfortunately, may not be dealt with adequately.

Table 4 Special audit coverage

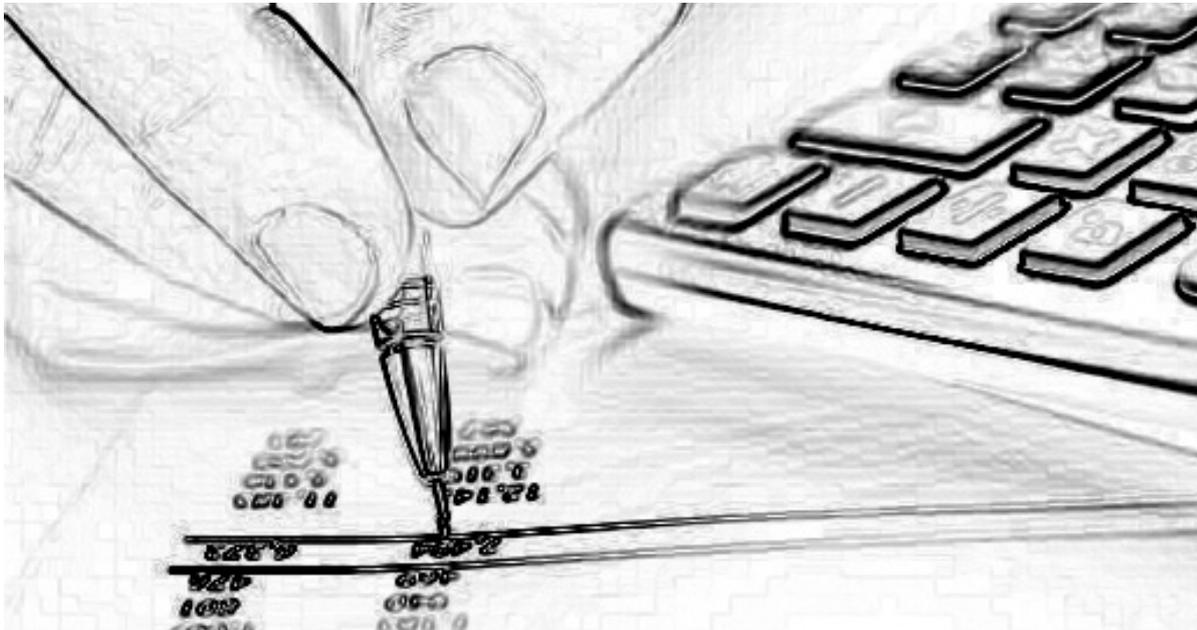
Year	Total		
	Audit	Taxpayers	%
2009	6,345	15,911,576	0.0399%
2010	3,100	19,112,590	0.0162%
2011	3,659	22,364,559	0.0164%

Source: DGT annual report 2009-2011

Table 5 Proportion of audits

Year	Total Audits		Proportion	
	Routine	Special	Routine	Special
2009	40,965	6,345	86.59%	13.41%
2010	42,307	3,100	93.17%	6.83%
2011	28,220	3,659	88.52%	11.48%

Source: DGT annual report 2009-2011



Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Basis Akrua

Oleh: Budi Mulyana -
Widyaiswara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, sebagaimana telah ditetapkan dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, wajib diterapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah selambat-lambatnya mulai Tahun Anggaran 2015. Di dalam masa transisi ini pemerintah daerah dapat menginisiasi secara sukarela untuk menyajikan informasi pendapatan dan belanja dengan basis akrual, yaitu dengan

cara melakukan adjustment (penyesuaian) terhadap informasi pendapatan dan belanja yang telah disajikan dengan basis kas di dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan item-item transaksi akrual yang terkait. Informasi pendapatan dan belanja daerah berbasis akrual tersebut bermanfaat untuk memberikan informasi tambahan baik kepada manajemen (pemerintah daerah) maupun pengguna laporan secara umum (stakeholders) guna mengevaluasi

kinerja keuangan pemerintah daerah secara komprehensif, tidak hanya dari sudut pandang basis kas, tetapi juga dari basis akrual. Di samping itu, penyajian informasi akrual tersebut juga bermanfaat untuk pengidentifikasian ayat-ayat akrual sehingga dapat menginternalisasikan pemahaman konsep akrual terutama bagi pihak penyaji laporan keuangan (pemerintah daerah) dalam rangka persiapan menghadapi penerapan SAP Akrual pada T.A 2015.

Di dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Selanjutnya, di dalam Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditegaskan kembali bahwa pelaksanaan pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya pada tahun anggaran 2008, dan selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Dengan demikian, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berbasis 'Kas menuju Akrual', sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, masih bersifat sementara (transisional).

Dalam perkembangan selanjutnya, Pemerintah menetapkan SAP yang baru yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP (berbasis akrual), sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP (berbasis kas menuju akrual). Selanjutnya, di dalam Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 (SAP yang baru tersebut) dinyatakan bahwa Pernyataan SAP (PSAP) berbasis akrual wajib diterapkan selambat-lambatnya dalam waktu 4 (empat) tahun sejak ditetapkannya.

Di dalam masa transisi ini, pemerintah daerah harus menyiapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi berbasis akrual dan sisdur akuntansi yang mendukung penerapan kebijakan akuntansi berbasis akrual tersebut. Sebelum pemerintah daerah dapat menghasilkan laporan keuangan berbasis akrual, pemerintah daerah dapat mem-*benchmark* apa yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat yaitu suatu upaya penyajian informasi pendapatan dan belanja berbasis akrual.

Adapun manfaat dari pedoman penyajian informasi akrual tersebut adalah sebagai berikut.:

- 1) Sebelum Pemerintah Daerah dapat menghasilkan laporan keuangan melalui sistem akuntansi keuangan daerah berbasis akrual yang berpedoman kepada PP 71/2010 tentang SAP. Pedoman penyajian informasi akrual ini, meskipun penerapannya bersifat opsional, bermanfaat sebagai alat analisis untuk mengukur kinerja pendapatan dan belanja secara komprehensif, bukan hanya dari sudut pandang basis kas, tetapi juga dari basis akrual;
- 2) Mengidentifikasi ayat-ayat akrual yang relevan dengan pendapatan dan belanja, sehingga bermanfaat untuk menginternalisasikan pemahaman konsep akrual dalam rangka menghadapi penerapan SAP Akrual.

RUANG LINGKUP PENYAJIAN INFORMASI AKRUAL

Informasi pendapatan dan belanja secara akrual disajikan secara terpisah dari Laporan Realisasi Anggaran berbasis kas yang dihasilkan dari Sistem Akuntansi Pemda. Penyajian informasi keuangan secara akrual meliputi:

- (1) Informasi pendapatan secara akrual
Informasi pendapatan secara akrual diperoleh dari realisasi pendapatan berbasis kas disesuaikan dengan transaksi pendapatan akrual. Transaksi pendapatan secara akrual sebagaimana dimaksud terdiri

dari:

- a. Pendapatan yang masih harus diterima
- b. Pendapatan diterima di muka.

(2) Informasi belanja secara akrual

Informasi belanja secara akrual diperoleh dari realisasi belanja berbasis kas disesuaikan dengan transaksi belanja akrual. Transaksi belanja secara akrual sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- a. Belanja yang masih harus dibayar.
- b. Belanja dibayar di muka.

INFORMASI PENDAPATAN AKRUAL

Pendapatan dengan basis akrual (selanjutnya disebut pendapatan akrual) adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan akrual merupakan pendapatan yang pengakuannya dilakukan ketika hak pemerintah daerah sudah muncul untuk menerima pendapatan tersebut dan jumlahnya sudah terukur, meskipun pembayaran kas-nya belum diterima di rekening Kas Umum Daerah ataupun di rekening bendahara penerimaan. Sebaliknya, pendapatan dengan basis kas sebagaimana yang dilaporkan di dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan pendapatan yang pengakuannya dilakukan ketika pembayaran kas-nya telah diterima di rekening Kas Umum Daerah ataupun di rekening bendahara penerimaan.

Ruang lingkup transaksi pendapatan secara akrual sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- a. Pendapatan yang masih harus diterima, dan/atau
- b. Pendapatan diterima di muka

Pendapatan yang Masih Harus Diterima adalah pendapatan yang sampai dengan tanggal pelaporan belum diterima pemerintah daerah (SKPD/Unit Kerja/PPKD) karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Contoh piutang pajak,

retribusi, dana perimbangan, dsb.

Pendapatan Diterima di Muka adalah pendapatan yang telah diterima oleh bendahara SKPD/Unit Kerja dan/atau telah disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, namun belum menjadi hak pemda. Contoh: pendapatan sewa di terima di muka, pendapatan pajak yang diterima di muka, dsb.

Tata Cara Penghitungan Jumlah Pendapatan Akrual

Informasi pendapatan akrual dihitung berdasarkan jumlah realisasi pendapatan berbasis kas sebagaimana telah dilaporkan di dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang disesuaikan dengan dua jenis transaksi akrual, yaitu: a) pendapatan yang masih harus diterima (piutang pendapatan); dan/ atau b) pendapatan yang diterima di muka (utang pendapatan). Untuk memperoleh informasi pendapatan akrual tersebut dapat menggunakan salah satu dari dua rumus berikut ini.

Rumus (1):

Pendapatan akrual = Pendapatan basis kas (yang telah dilaporkan di LRA) – pembayaran piutang pendapatan tahun lalu yang diterima tahun berjalan + pendapatan yang masih harus diterima dari transaksi tahun berjalan – pendapatan yang diterima di muka pada tahun berjalan + pendapatan yang diterima di muka pada tahun lalu yang telah menjadi hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan.

Atau, Rumus (2):

Rumus (2) diperoleh dengan penyederhanaan dari Rumus (1) di atas sbb:

Pendapatan akrual = Pendapatan basis kas (yang telah dilaporkan di LRA) + kenaikan saldo akun pendapatan yang masih harus diterima (atau dikurangi penurunan saldo akun pendapatan yang masih harus diterima) – kenaikan saldo akun pendapatan yang diterima di muka (atau ditambah penurunan saldo akun

pendapatan yang diterima di muka).

Penjelasan:

- a) Kenaikan saldo akun pendapatan yang masih harus diterima terjadi apabila saldo akhir tahun dari akun 'pendapatan yang masih harus diterima' lebih besar dari saldo awal tahunnya, dan selisih lebih tersebut merupakan jumlah kenaikan saldo akun 'pendapatan yang masih harus diterima'. Jika yang terjadi adalah kondisi sebaliknya, yaitu apabila saldo akhir tahun dari akun 'pendapatan yang masih harus diterima' lebih kecil dari saldo awal tahunnya, maka selisih kurang tersebut disebut penurunan saldo akun 'pendapatan yang masih harus diterima'. Catatan: *jika penurunan saldo akun 'pendapatan yang masih harus diterima' tersebut disebabkan oleh adanya penghapusan saldo piutang pendapatan atau direklasifikasi ke akun aset lainnya, maka saldo piutang yang dihapuskan dan/atau direklasifikasi tersebut tidak dianggap sebagai pengurang piutang pendapatan dalam konteks penggunaan rumus (2) ini.*

Contoh (1) :

Akun Pendapatan yang masih harus diterima menunjukkan saldo awal per 31 Des 2012 sebesar Rp 2.500.000 dan saldo akhir per 31 Des 2013 menunjukkan saldo sebesar Rp 4.500.000, maka kondisi ini menunjukkan terjadinya kenaikan saldo akun pendapatan yang masih harus diterima sebesar Rp 2.000.000. Jumlah **kenaikan** saldo akun pendapatan yang masih harus diterima tersebut, yaitu sebesar Rp 2.000.000 akan menjadi **penambah** pendapatan basis kas dalam perhitungan jumlah pendapatan basis akrual.

Contoh (2) :

Akun Pendapatan yang masih harus diterima menunjukkan saldo awal per 31 Des 2012 sebesar Rp 2.500.000 dan saldo

akhir per 31 Des 2013 menunjukkan saldo sebesar Rp 1.500.000, maka kondisi ini menunjukkan terjadinya **penurunan** saldo akun pendapatan yang masih harus diterima sebesar Rp 1.000.000. Jumlah penurunan saldo akun pendapatan yang masih harus diterima tersebut, yaitu sebesar Rp 1.000.000,- akan menjadi **pengurang** pendapatan basis kas dalam perhitungan jumlah pendapatan akrual.

- b) Kenaikan saldo akun pendapatan yang diterima di muka terjadi apabila saldo akhir tahun dari akun 'pendapatan yang diterima di muka' lebih besar dari saldo awal tahunnya, dan selisih lebih tersebut merupakan jumlah kenaikan saldo akun 'pendapatan yang diterima di muka'. Jika yang terjadi adalah kondisi sebaliknya, yaitu apabila saldo akhir tahun dari akun 'pendapatan yang diterima di muka' lebih kecil dari saldo awal tahunnya, maka selisih kurang tersebut disebut penurunan saldo akun 'pendapatan yang diterima di muka'.

Contoh (1) :

Akun Pendapatan yang diterima di muka menunjukkan saldo awal per 31 Desember 2012 sebesar Rp 500.000 dan saldo akhir per 31 Desember 2013 menunjukkan saldo sebesar Rp 2.000.000, maka kondisi ini menunjukkan terjadinya kenaikan saldo akun pendapatan yang diterima di muka sebesar Rp 1.500.000. Jumlah **kenaikan** saldo akun pendapatan yang diterima di muka tersebut, yaitu sebesar Rp 1.500.000 akan menjadi **pengurang** pendapatan basis kas dalam perhitungan jumlah pendapatan akrual.

Contoh (2) :

Akun Pendapatan yang diterima di muka menunjukkan saldo awal per 31 Des 2012 sebesar Rp 1.500.000 dan saldo akhir per 31 Desember 2013 menunjukkan saldo sebesar Rp 1.000.000, maka kondisi ini menunjukkan terjadinya penurunan saldo akun pendapatan yang diterima di muka sebesar Rp 500.000. Jumlah **penurunan**

saldo akun pendapatan yang diterima di muka tersebut, yaitu sebesar Rp 500.000 akan menjadi **penambah** pendapatan basis kas dalam perhitungan jumlah pendapatan akrual.

INFORMASI BELANJA AKRUAL

Belanja yang diakui dengan basis akrual (selanjutnya disebut belanja akrual) adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak dapat diterima kembali.

Sebaliknya, belanja dengan basis kas sebagaimana diakui/dilaporkan di dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan belanja yang sudah dibayarkan kas-nya dari rekening Kas Umum Daerah, dan/atau belanja yang dibayarkan oleh bendahara pengeluaran SKPD yang pertanggungjawabannya telah disahkan oleh unit yang memiliki fungsi perbendaharaan.

Di dalam PP No. 71 tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual, dikenal istilah beban yang maknanya sedikit berbeda dan/atau lebih luas dari belanja akrual. Beban adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Pengertian beban mencakup belanja akrual (namun tidak termasuk belanja persediaan dan belanja modal) dan pengakuan atas penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dari aset, contoh beban penyusutan aset tetap, beban pemakaian persediaan. Adapun di dalam artikel ini digunakan konsep belanja akrual, bukan beban.

Ruang lingkup transaksi belanja akrual sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- a. Belanja yang masih harus dibayar, dan/atau
- b. Belanja dibayar di muka.

Belanja yang Masih Harus Dibayar adalah kewajiban yang timbul akibat hak atas barang/jasa yang telah diterima/dinikmati dan/atau perjanjian/komitmen yang

dilakukan oleh pemerintah daerah (SKPD/Unit Kerja/PPKD) namun sampai pada akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/pelunasan/realisasi atas hak/perjanjian/komitmen tersebut.

Belanja Dibayar di Muka adalah pengeluaran pemerintah daerah (SKPD/Unit kerja/PPKD) yang telah dibayarkan dari Rekening Kas Umum Daerah dan membebani pagu anggaran, namun barang/jasa/fasilitas dari pihak ketiga belum diterima/dinikmati pemerintah daerah (SKPD/Unit Kerja/PPKD).

Tata Cara Penghitungan Jumlah Belanja Akrual

Informasi belanja akrual diperoleh dari realisasi belanja berbasis kas yang disesuaikan dengan dua jenis transaksi belanja akrual, yaitu: a) Belanja yang masih harus dibayar, dan/atau b) Belanja dibayar di muka. Untuk memperoleh informasi belanja akrual tersebut dapat menggunakan salah satu dari dua rumus di bawah ini.

Rumus (1):

Belanja akrual = Belanja basis kas (yang telah dilaporkan di LRA) – pembayaran utang belanja tahun lalu yang dibayar tahun berjalan + belanja yang masih harus dibayar dari transaksi tahun berjalan – belanja yang dibayar di muka pada tahun berjalan + belanja yang dibayar di muka pada tahun lalu yang telah diterima barang/jasanya pada tahun berjalan.

Atau, Rumus (2):

Rumus (2) diperoleh dengan penyederhanaan dari Rumus (1) di atas sebagai berikut:

Belanja akrual = Belanja basis kas (yang telah dilaporkan di LRA) + kenaikan saldo akun belanja yang masih harus dibayar (atau dikurangi penurunan saldo akun belanja yang masih harus dibayar) – kenaikan saldo akun belanja yang dibayar di muka (atau ditambah penurunan saldo akun belanja yang dibayar di muka).

Penjelasan:

- a) Kenaikan saldo akun belanja yang masih harus dibayar terjadi apabila saldo akhir tahun dari akun 'belanja yang masih harus dibayar' lebih besar dari saldo awalnya, dan selisih lebih tersebut merupakan jumlah kenaikan saldo akun 'belanja yang masih harus dibayar'. Jika yang terjadi adalah kondisi sebaliknya, yaitu apabila saldo akhir tahun dari akun 'belanja yang masih harus dibayar' lebih kecil dari saldo awalnya, maka selisih kurang tersebut disebut penurunan saldo akun 'belanja yang masih harus dibayar'.

Contoh (1) :

Akun Belanja yang masih harus dibayar menunjukkan saldo awal per 31 Desember 2012 sebesar Rp 2.500.000 dan saldo akhir per 31 Desember 2013 sebesar Rp 4.500.000, maka kondisi ini menunjukkan terjadinya kenaikan saldo akun belanja yang masih harus dibayar sebesar Rp 2.000.000. Jumlah **kenaikan** saldo akun belanja yang masih harus dibayar tersebut, yaitu sebesar Rp 2.000.000 akan menjadi **penambah** belanja basis kas dalam perhitungan jumlah belanja akrual.

Contoh (2) :

Akun Belanja yang masih harus dibayar menunjukkan saldo awal per 31 Desember 2012 sebesar Rp 2.500.000 dan saldo akhir per 31 Desember 2013 sebesar Rp 1.500.000, maka kondisi ini menunjukkan terjadinya **penurunan** saldo akun belanja yang masih harus dibayar sebesar Rp 1.000.000. Jumlah penurunan saldo akun belanja yang masih harus dibayar tersebut, yaitu sebesar Rp 1.000.000 akan menjadi **pengurang** belanja basis kas dalam perhitungan jumlah belanja akrual.

- b) Kenaikan saldo akun belanja yang diterima di muka terjadi apabila saldo akhir tahun dari akun 'belanja

yang dibayar di muka' lebih besar dari saldo awalnya, dan selisih lebih tersebut merupakan jumlah kenaikan saldo akun 'belanja yang dibayar di muka'. Jika yang terjadi adalah kondisi sebaliknya, yaitu apabila saldo akhir tahun dari akun 'belanja yang dibayar di muka' lebih kecil dari saldo awalnya, maka selisih kurang tersebut disebut penurunan saldo akun 'belanja yang dibayar di muka'.

Contoh (1) :

Akun Belanja yang dibayar di muka menunjukkan saldo awal per 31 Desember 2012 sebesar Rp500.000 dan saldo akhir per 31 Desember 2013 sebesar Rp 2.000.000, maka kondisi ini menunjukkan terjadinya kenaikan saldo akun belanja yang dibayar di muka sebesar Rp1.500.000. Jumlah **kenaikan** saldo akun belanja yang dibayar di muka tersebut, yaitu sebesar Rp 1.500.000 akan menjadi **pengurang** belanja basis kas dalam perhitungan jumlah belanja akrual.

Contoh (2) :

Akun Belanja yang dibayar di muka menunjukkan saldo awal per 31 Desember 2012 sebesar Rp1.500.000 dan saldo akhir per 31 Desember 2013 sebesar Rp 1.000.000, maka kondisi ini menunjukkan terjadinya penurunan saldo akun belanja yang dibayar di muka sebesar Rp500.000. Jumlah **penurunan** saldo akun belanja yang dibayar di muka tersebut, yaitu sebesar Rp 500.000 akan menjadi **penambah** belanja basis kas dalam perhitungan jumlah belanja akrual.

Informasi pendapatan dan belanja secara akrual meliputi seluruh transaksi pendapatan yang masih harus diterima (aset), pendapatan diterima dimuka (utang), belanja yang masih harus dibayar (utang), dan belanja dibayar di muka (aset). Penyajian informasi pendapatan dan belanja secara akrual merupakan sebuah

pendekatan untuk memberikan informasi tambahan mengenai laporan realisasi pendapatan dan belanja dengan basis akrual.

Penyajian LRA dengan basis akrual oleh pemerintah daerah memang bukan merupakan komponen laporan keuangan yang wajib disusun berdasarkan SAP. Meski demikian, pada instansi-instansi Pemerintah Pusat penyajian informasi pendapatan dan belanja berbasis akrual tersebut merupakan suatu keharusan untuk dibuat dengan berpedoman pada Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan No. 62 Tahun 2009, untuk ‘menjembatani’ masa transisi dari penerapan SAP berbasis ‘kas menuju akrual’ ke SAP berbasis ‘akrual’.

Informasi Pendapatan dan Belanja berbasis akrual tersebut sifatnya opsional dan di masa yang akan datang tentunya tidak dimaksudkan untuk menggantikan Laporan Operasional (LO) sebagaimana dimaksud di dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP. Hal ini disebabkan ada beberapa perbedaan antara LRA berbasis akrual dengan LO, antara lain:

- a) Informasi Pendapatan dan Belanja berbasis akrual tidak menyajikan akun ‘Penyusutan Aset Tetap’, sementara di dalam LO menyajikan akun penyusutan;
- b) Informasi Pendapatan dan Belanja berbasis akrual menyajikan semua akun pendapatan dan belanja, sementara di dalam LO tidak menyajikan akun belanja modal.

Adapun jika pada saatnya basis akuntansi akrual telah diterapkan, LRA tetap disajikan dengan basis kas. Sementara itu akan dihasilkan komponen laporan keuangan baru sebagai ‘produk’ dari basis akrual antara lain yaitu Laporan Operasional (LO). Oleh karena itu, LRA berbasis akrual sekali lagi bukan merupakan komponen laporan keuangan yang wajib disusun oleh pemda, sehingga tidak wajib dibuat jika sudah mampu menghasilkan LO.

Namun demikian, rumus-rumus yang

digunakan untuk menyajikan LRA berbasis akrual sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat bermanfaat untuk digunakan dalam menguji/menganalisis validitas penyajian pendapatan dan beban yang disajikan di dalam LO, sepanjang prinsip-prinsip pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja secara akrual telah diterapkan sesuai dengan SAP berbasis akrual.

Penyajian informasi pendapatan dan belanja daerah berbasis akrual dengan menggunakan rumus-rumus penyesuaian sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelum dapat disajikan dengan format seperti pada tabel di halaman berikut.

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA BERBASIS AKRUAL
 UNTUK TAHUN ANGGARAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20XX

URAIAN	Realisasi menurut Basis Kas (LRA)	Penyesuaian Akrual		Realisasi menurut Basis Akrual
		Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5 = 2+3-4
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
Lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx	xxx	xxx
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	xxx	xxx	xxx	xxx
PENDAPATAN TRANSFER				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xxx	xxx
Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xxx	xxx
Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
TOTAL PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	xxx	xxx	xxx	xxx
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xxx	xxx
TOTAL PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	xxx	xxx	xxx	xxx
TRANSFER DARI PEMDA LAINNYA				
Bagi Hasil dari Pemda lain	xxx	xxx	xxx	xxx
Transfer lainnya dari Pemda lain	xxx	xxx	xxx	xxx
TOTAL PENDAPATAN TRANSFER DARI PEMDA LAINNYA	xxx	xxx	xxx	xxx
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	xxx	xxx	xxx	xxx
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx

Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
JUMLAH PENDAPATAN LAIN-LAIN YANG SAH	xxx	xxx	xxx	xxx
JUMLAH PENDAPATAN	xxx	xxx	xxx	xxx
BELANJA				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Barang	xxx	xxx	xxx	xxx
Bunga	xxx	xxx	xxx	xxx
Subsidi	xxx	xxx	xxx	xxx
Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xxx
JUMLAH BELANJA OPERASI	xxx	xxx	xxx	xxx
BELANJA MODAL				
Belanja Tanah	xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
JUMLAH BELANJA MODAL	xxx	xxx	xxx	xxx
BELANJA TAK TERDUGA				
Belanja Tak Terduga	xxx	xxx	xxx	xxx
JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	xxx	xxx	xxx	xxx
TRANSFER				
TRANSFER / BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN / KOTA				
Bagi Hasil ke Pemda lain	xxx	xxx	xxx	xxx
Transfer lainnya ke Pemda lain	xxx	xxx	xxx	xxx
JUMLAH TRANSFER KE PEMDA LAINNYA	xxx	xxx	xxx	xxx
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	xxx	xxx	xxx	xxx
SURPLUS (DEFISIT)	xxx	xxx	xxx	xxx



Audit for Public Budgeting Case: Regency or Municipality (Pemda) in Indonesia

Oleh: Muhammad Rifky Santoso -
Widyaiswara Pusdiklat Pajak

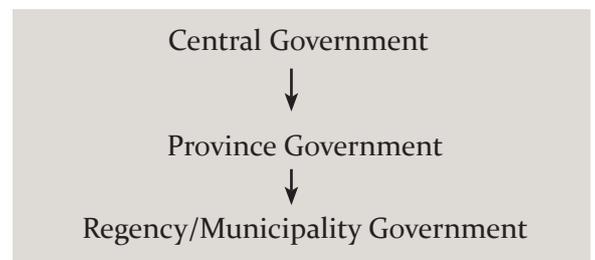
Abstract

Regency has authority to develop its territory. Consequently, Regency or Pemda should apply Good Governance in its performance. Pemda's performances have been reported in audited financial statement. This audit can be one tool to measure accountability. In fact, although opinion in the financial statement is fair, society and private sector are not satisfied with the Pemda's performance. It is necessary to increase budget quality. One dimension of Good Governance is quality of budget. In Indonesia, budget prepared by Pemda should have been legitimated by Parliament. Central Government has stated a rule how to prepare the budget.

Actually, this legitimating is not enough. It is necessary to audit budgeting process. The purpose this audit is to make sure that the budget is fair. As a result, Pemda can apply Good Governance.

Introduction

Before further exploring, I will show Indonesia government system as Picture 1:



Indonesia is a Republic. To give services or increase welfare to society, Central Government share and delegate its authority to Province and Regency or Municipality Government.

In Indonesia government system, Regency or Municipality has authority to develop its territory. This Regency is called Pemerintah Daerah Tingkat II or Pemda. With the authority, it's looking forward to develop territory suitable with society needs and resources. One reason of delegating the authority is Pemda knows well about its territory.

To do its duties, Pemda should apply Good Governance in all its policies or activities. What kind of Good Governance that should be applied by Pemda? Is it any special treatment for applying Good Governance for Pemda?

This article will discuss one dimension of Good Governance that could be applying to get Good Governance in Pemda. The dimension is the quality of budgetary and financial management.

Good Governance

What is Good Governance? There are many definitions about good governance. The term Governance can be defined as the exercise of economic, political and administrative authority to manage a country's affairs at all levels. It comprises mechanisms, processes, and institutions through which citizens and groups articulate their interests, exercise their legal rights, meet their obligations, and mediate their differences (UNDP). If the term "Good" is added in Governance, Good Governance can be defined as Governance has good conditions, like participatory, transparent and accountable, effective, equitable and promotes the rule of law (UNDP).

According to World Bank CPIA indicators, dimensions of governance are:

1. Property rights and rule-based governance,
2. The quality of budgetary and financial management,
3. The efficiency of revenue mobilization,

4. The efficiency of public expenditures, and
5. Transparency, accountability and corruption.

In applying Good Governance, Pemda cannot work by itself. There are three (3) actors in order to get Good Governance. The actors are government, private sector and civil society.

These three actors should work together as a team and interact with each other. The role of government is as a facilitator to create a favorable environment that can support the work and interaction. The favorable environment likes economic, politic, social, culture, law and security.

Within favorable environment, the actors of Good Governance can give or use their resources optimally to reach government vision or mission. Clearly that the main point of government vision is prosperity to its people. One way to reach the vision is by economic growth.

Creating favorable environment is by applying dimension of good governance well. In other word is to applying Good Governance. Applying all of the dimensions ideally is difficult. Nevertheless, it's mean that Good Governance cannot be applied. By this reason, the application of Good Governance is gradually and started now.

Dimension of Good Governance

By using dimension of Good Governance from World Bank CPI Indicators, writer will discuss what kind of dimensions that can be applied in Indonesia to create Good Governance. Clearly that application Good Governance can increase people prosperity.

Every Pemda in Indonesia is mandatory to have public financial statement as accountability for its performance. This financial statement is audited by Financial Audit Agency (Badan Pemeriksa Keuangan/ BPK). This agency is a special body that is an independent party from Pemda. The body's job is as a government auditor. Nevertheless, there is no audit by independent party for budget that is prepared by Pemda.

Before doing its duties, Pemda should make budget that is suitable for its planning. The budget should have legitimating from legislative or Parliament. Parliament member will review account in the budget. Reviewing by Parliament will raise debate. For the past debate, the nature of reviewing is how the expenditure will suitable or not with party line of Parliament member.

In order create Good Governance in Pemda government, the quality of budgetary and financial management, as one of dimension of Good Governance, should be applied. To get this quality, the process in preparing budgeting should be accountable. To convince the process in the right track, audit in preparing budgeting is necessary.

Actually, auditing in budgeting is not a new process. This audit has been done in some entity, such as audit in Public Service Commission in Canada. For Indonesia, this kind of audit is not popular. In this paper, writer will propose audit in budgeting that prepared by Pemda with reasons:

1. It is necessary to increase Good Governance in Pemda (Regency or Municipality)
2. Creating of optimal exploring resources in Pemda's territory
3. Expenditures are suitable with vision or missions that have been stated

Before further exploration, the budget's structure of Pemda will be explained.

The structure of Pemda's budget has been stated by the rule that is stated by Ministry of Home Affair, Rule number 13, year 2006. According to this rule, structure of budget consists of:

1. Revenues from Pemda's region.
2. Expenditures for Pemda's region
3. Financing for Pemda

Revenues from Pemda's Region

These revenues are Pemda's right as increasing net wealth in one year period. The revenues consist of:

- a. Revenues Originally from the Region.
These revenues come from the Pemda's

region potential resources. To collect the revenues, Pemda should make rules. These revenues consist of taxes, retributions, contribution from resources governance, sale of wealth and others.

b. Balancing Funds.

These funds are from central government's revenues. The distributions from central government to Pemdases are regulated by the rules. The funds consist of Ordinary Distribution Fund (Dana Alokasi Umum/DAU), Special Distribution Fund (Dana Alokasi Khusus/DAK), and Sharing Revenue Fund that contains tax and non tax sharing.

c. Other Revenues.

Other revenues those are legitimated by the laws, such as donate.

Expenditures for Pemda's Territory

Expenditures include all money spending from Pemda's cash account. This cash outflow reduces Pemda's equity. The expenditures are Pemda's obligation in one year period. This is no refund for the expenditures.

The Expenditures are allocated for:

- Obligation Expenditures
- Choosing Expenditures
- Function, Program and other Expenditures.

Obligation expenditures should be done by Pemda. These expenditures consist of education, health, infrastructure, housing, and others expenditures. There are twenty four (24) kinds of expenditures for obligation expenditures.

The regulation stated eight kinds of Choosing Expenditures, such as for farming, forestry, energy, trading, industry and others.

Expenditures based from function and program consist of salary, interest, grant, donation, buying asset, fee for services and others.

Financing For Pemda

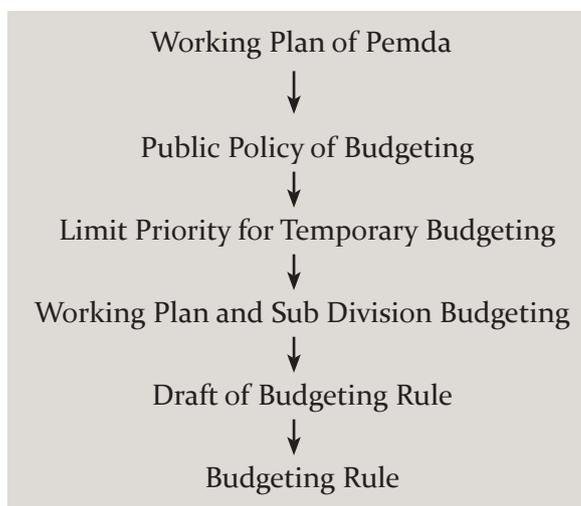
Financing is every fund receiving that should be paid back or every expenditure

that should be received. The payment and receiving can be happened in the year of preparation of the budget or in the next year. The purpose of this financing is to balance the budget like as a deficit or surplus for budgeting.

Some accounts for the financing are balance from last budgeting, borrowing, making allowance, investment and lending money.

Budgeting Process

The rule gives steps how to prepare the budget. The steps are as shown in the picture 2.



Before starting working, Pemda should have plan. The plan can be in long term (20 years), medium term (5 years) and yearly term. The rule gives guidance how to prepare the plan, such as bottom up process and minimum service standard.

To realize policy to be action, a bridge is needed. For this reason, there are two rules:

1. Identification policy with resources.
This identification will produce estimation. Although the estimation is still rough, it is needed to calculate expenditure with the impact.
2. All proposals should be consulted and coordinated to the interrelated party.

The budget should be based on performance. For the reason, the budget is based on performance indicators, output, outcome, expenditure analysis, and

minimum service standard. Some principles in preparing the budget are:

1. Revenues budgeting should be rationally measured and can be realized.
2. Expenditures for buying assets or services should be the ceiling standard.
3. Expenditures budgeting should be supported by revenues.
4. All revenues and expenditures should use Pemda's account.

Before consultation with Parliament, the draft of budgeting rule should be prepare. There is guidance to make the draft, such as all items about detail revenues, expenditures and financing should be attached.

Budgeting Audit

The guidance and control in preparing budget have been stated in the rule. Actually, there is no control from independent party. It is necessary audit in budgeting by independent party to make sure that the budget is fairly.

Besides the process in preparing budget, others audit focuses are:

- a. The fairness in stated revenues and expenditures budget.
- b. The correlation between Revenues Originally from the Region and potential resources.
- c. The relation between budget and vision and mission of Pemda

Process Budgeting Audit

This process is management process. If the process is audited, the focus is in management functions, like planning, organizing, actuating and controlling.

Planning

To estimate Revenues Originally from the Region, Pemda should have a reasonable way to state the amount of revenues. Commonly, the revenue budget is estimated by using revenues realization from the last year added a certain percentage. Ideally, the revenue budget is estimated from potential resources in the Pemda's territory. One way to know the potential resources is by using research.

Pemda do not have power to plan revenue from Balancing Fund (from central government). The Central Government has full authority to distribute this Fund. Focus audit for this revenue is whether the distribution is suitable with the law and Pemda's need.

Although expenditures have been allocated in accordance with the rule, there is no rule about proportion. It can be that expenditures for Function are more than for Obligation Expenditures. Every Pemda has limitation and different priority. Ideally, the expenditures have fit priority that support Pemda's vision, mission and society need.

Organizing

In this process, the critical points are:

- Units that are involved in preparing budget. Function of the units should be clearly stated. In result, each unit will know how and when to prepare the budget.
- Contribution from each unit prepared budget. Mechanism of preparing budget is bottom up. Each unit will know how to prepare and comply data.
- Internal control function. In this case, the questions are about internal control function and who will be responsible to the functions.
- Human resources in preparing budget. The question are the ability and the number of human resources.

Actuating

The critical points in this process are:

- How to get and comply data
- How to coordinate unit and person involved in the budget process
- What technology applied in the budget process, such as information

technology system

- How to document the process
- How to analyze revenues and expenditures budgeting
- What kind of forms used in the process
- How to estimate input, output and outcome in budget
- How to estimate risk

Controlling

Although process in prepare budget is controlled by Parliament, it is meant that this control is not enough. Other control is needed. Control in planning, organizing and actuating budget process is necessary. This control can be built in the system or done by internal control.

Conclusion

Pemda has authority to develop and to welfare its society. In order to achieve Pemda's target, Good Governance is mandatory applied in Pemda's government. Ideally, all dimensions of Good Governance are applied, but it is difficult. Some dimension has been applied, such as transparency in preparing budget. This transparency is stated by Ministry of Home Affair, Rule number 13 year 2006. In the meantime, it is necessary to make sure that budget prepared by Pemda meets a certain quality. The quality can be achieved by controlling the process in preparing budget. One of the controls is audit in budget process by independent party.

Audit focus in budget process is planning, organizing, actuating and controlling. From the audit, the fairness of budget will be met, such as revenues that are suitable with potential resources and expenditures that fit with vision and mission of Pemda.



Bagaimana Pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja Diimplementasikan Agar Meningkatkan Kualitas Anggaran Publik

Oleh: Mangappu Pasaribu -
Pegawai pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pendahuluan

Reformasi pengelolaan keuangan negara telah berjalan satu dekade sejak terbitnya paket Undang Undang Keuangan Negara (UU 17/2013, UU 1/2004 dan UU 15/2004). Salah satu poin penting dalam paket peraturan dimaksud ialah perubahan paradigma dalam perencanaan dan

penganggaran pemerintah dari metode *traditional line-item budgeting* kepada *result-based budgeting*. Ada perbedaan mendasar dalam kedua pendekatan tersebut dimana pendekatan lama lebih memperhatikan penyediaan sumberdaya masukan yang akan diperlukan oleh setiap organisasi pemerintah. Sebaliknya, pendekatan baru berorientasi pada hasil yang akan dicapai dalam penetapan alokasi

sumberdaya (*resources*). Secara konsepsi, penganggaran berbasis kinerja lebih logis daripada penganggaran berbasis input karena adanya hubungan yang rasional antara penyediaan sumberdaya dengan hasil yang diharapkan. Namun secara faktual, implementasi pendekatan baru dalam perencanaan anggaran belum teruji apakah telah berhasil mencapai tujuannya mengingat masih terbatasnya penelitian dan evaluasi terhadap program-program pemerintah.

Menurut PP Nomor 90 Tahun 2010, Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) bertujuan untuk meningkatkan kualitas anggaran publik. Atas dasar pemikiran dimaksud, penulis berpendapat bahwa kualitas anggaran publik tercapai apabila: (1) pengeluaran Negara dilakukan secara efisien dan efektif (*operational efficiency*); (2) akuntabilitas keuangan publik meningkat, dan (3) tercapai transparansi dalam pengelolaan anggaran publik. Untuk mencapai kualitas anggaran, perlu diperoleh informasi dan fakta kinerja sebagai alat yang digunakan dalam penetapan pengalokasian anggaran (OECD 2007).

Artikel ini bermaksud untuk menjelaskan bagaimana proses penganggaran berbasis kinerja dilakukan melalui suatu sistem manajemen penganggaran publik dalam rangka mengumpulkan informasi-informasi kinerja. Tujuannya ialah agar tercapai kualitas anggaran publik berdasarkan informasi kinerja yang kredibel yang digunakan dalam proses kebijakan pembagian anggaran publik.

Maksud dan Bentuk Penganggaran Berbasis Kinerja

PBK merupakan suatu metode penganggaran publik yang telah dipakai oleh negara-negara yang tergabung dalam *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) sejak tahun 1990-an. Menurut laporan OECD, PBK berdampak positif terhadap peningkatan efisiensi anggaran publik (OECD 2007). Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia telah mulai mengadopsi metode dimaksud

dalam rangka efisiensi anggaran sejak tahun 2005. Kongkretnya tercermin pada Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 yang secara jelas menginstruksikan agar Kementerian/Lembaga menggunakan pendekatan PBK dalam menyusun rencana anggaran belanja. PBK, menurut PMK 94 Tahun 2013, adalah suatu pendekatan dalam sistem perencanaan dan penganggaran belanja negara yang menunjukkan secara jelas antara alokasi pendanaan dan kinerja yang diharapkan atas alokasi tersebut, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja. Landasan teori yang mendasari penerapan PBK yaitu: (1) *output and outcome oriented*; (2) *money follow function*; dan (3) *let the manager manages*.

Menurut OECD, *performance-based budgeting is a form of budgeting that relates fund allocated to measurable results*. Artinya, PBK adalah suatu metode penganggaran publik yang menghubungkan antara alokasi anggaran dengan hasil-hasil yang akan dicapai. Ada tiga jenis *performance-based budgeting*. Pertama, *presentational budgeting* yaitu suatu bentuk penganggaran publik yang mensyaratkan informasi-informasi kinerja dalam proses penganggaran. Akan tetapi informasi-informasi kinerja dimaksud belum dipakai sebagai dasar dalam menentukan besaran alokasi anggaran. Kedua, *performance informed budgeting* adalah format penganggaran publik yang sudah menggunakan informasi kinerja dalam proses pengambilan keputusan untuk pengalokasian anggaran namun tidak secara otomatis mempengaruhi jumlah alokasi anggaran. Yang ketiga, *direct performance budgeting* yaitu format penganggaran publik yang telah secara langsung menghubungkan informasi kinerja terhadap kebijakan pengalokasian anggaran publik (Kelly and Wanna 2000; OECD 2007).

Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja

Agar pelaksanaan PBK dapat meningkatkan kualitas anggaran, perlu tersedia informasi dan fakta dalam pengambilan keputusan.

Berikut akan dijabarkan tahapan proses pelaksanaan PBK sampai pada pengumpulan informasi kinerja yang merujuk pada laporan penelitian yang dilakukan oleh Christiane Lorenz (Lorenz 2012).

Pertama, menyusun rencana strategis organisasi jangka menengah (3-5 tahun). Rencana strategis merupakan penjabaran visi dan misi organisasi ke dalam beberapa sasaran dan tujuan organisasi. Penyusunan rencana strategis dilakukan untuk menjawab: (1) untuk apa organisasi/program dibentuk?; (2) apa yang diharapkan akan dicapai oleh organisasi/program?; (3) bagaimana mengetahui bahwa organisasi/program telah berhasil dalam mencapai tujuannya?; dan yang tidak kalah penting ialah (4) kepada siapa organisasi bertanggung jawab atau para pemangku kepentingan yang akan menilai kinerja organisasi/program.

Kedua, membuat rencana operasional tahunan. Para manajer publik menyusun rencana kerja yang merupakan turunan dari rencana strategis organisasi. Rencana operasional meliputi perumusan: (1) input atau sumberdaya yang akan dibutuhkan; (2) aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan; (3) volume output yang akan dihasilkan, serta (4) hasil (*outcomes*) sebagai indikator keberhasilan organisasi/program. Akurasi perencanaan kinerja sangat menentukan tingkat keberhasilan pelaksanaan anggaran karena perencanaan yang baik kemungkinan besar akan menghasilkan kinerja yang sesuai dengan harapan.

Ketiga, eksekusi anggaran kinerja tahunan. Tahapan ini merupakan operasionalisasi perencanaan anggaran tahunan yang dilakukan dalam rangka mencapai hasil yang diharapkan. Pada tahap ini, para manajer publik diharapkan melakukan administrasi kinerja dengan baik yang akan diperlukan dalam pelaporan kinerja. Selain itu, setiap tantangan dan hambatan perlu didokumentasikan dengan tertib guna pembelajaran organisasi ke depan. Disamping itu, dokumen-dokumen kinerja dimaksud juga merupakan informasi

yang penting dalam pengukuran kinerja organisasi.

Keempat, melakukan pengukuran kinerja. Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur (PMK 249/2011). Pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai apakah sumberdaya input yang disediakan telah terpakai secara efektif dan efisien dalam mencapai hasil yang diharapkan. Dengan kata lain, pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai apakah semua elemen organisasi (input, proses, output) telah berfungsi secara optimal untuk menghasilkan *outcomes*. Selain itu, pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai apakah target kinerja indikator kinerja utama telah tercapai sesuai dengan rencana kerja tahunan.

Kelima, monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Kegiatan ini dilakukan untuk memonitor perkembangan pelaksanaan anggaran sebagai upaya tindakan preventif dalam mencegah kegagalan dan menilai kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran. Sedangkan evaluasi program dilakukan untuk menilai sejauh mana kegiatan atau program pemerintah telah berhasil mencapai tujuannya dan apakah hasil dimaksud telah memberikan dampak yang signifikan dalam memenuhi tujuan organisasi. Pada umumnya kegiatan ini dilakukan sendiri oleh induk organisasi namun perlu melibatkan tenaga ahli dibidangnya untuk menghasilkan hasil evaluasi yang kredibel.

Terakhir, *comprehensive spending review* atau *public expenditure review*. *Comprehensive spending review* (CSR) adalah suatu kegiatan untuk menilai seluruh program pemerintah apakah telah berhasil mencapai nilai publik atau prioritas kebijakan regim pemerintah. Di beberapa negara maju seperti Inggris, CSR biasanya berakibat pada pemotongan anggaran jika terjadi duplikasi, inefisiensi dan *einmalig* dalam pelaksanaan anggaran publik. Hendaknya praktek ini dilakukan di Indonesia untuk menilai apakah pengguna anggaran telah menciptakan nilai publik

(*public value creation*) (Moore 1995) sesuai dengan janji pemerintahan yang terpilih. Namun demikian, untuk melakukan CSR perlu dukungan politik dari pemimpin pemerintah terpilih serta lembaga legislatif (Grizzle and Pettijohn 2003).

Proses implementasi PBK terdiri atas enam tahapan penting dalam menghasilkan informasi kinerja yang lengkap, akurat dan kredibel. Kelemahan penetapan tujuan organisasi dan indikator-indikator kinerjanya akan berakibat pada kesalahan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Demikian halnya, perencanaan yang tidak akurat akan menimbulkan pelaksanaan anggaran yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi dan *spending review* agar otoritas keuangan negara serta badan legislatif dapat menggunakan informasi kinerja yang kredibel dan akurat dalam kebijakan alokasi anggaran. Singkatnya, PBK dapat mencapai tujuannya apabila para pembuat kebijakan menggunakan informasi kinerja yang kredibel dalam menentukan besaran alokasi anggaran pemerintah.

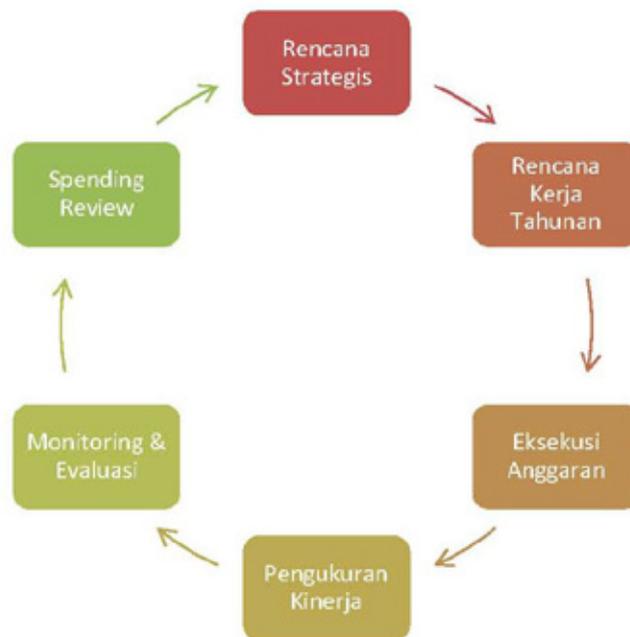
Manfaat Penganggaran Berbasis Kinerja

Ada tiga manfaat utama yang diharapkan dalam pelaksanaan PBK. Pertama, meningkatkan efisiensi anggaran publik. Menurut OECD, efisiensi anggaran diklasifikasikan dalam tiga jenis yaitu: (1) *operational efficiency*, (2) *allocative efficiency*, dan (3) *aggregate efficiency*. *Operational efficiency* terjadi apabila para manajer publik menghasilkan satu output dengan input yang lebih sedikit atau dengan sumberdaya yang sama, satu organisasi dapat menghasilkan output yang lebih banyak. Kedua, *allocative efficiency* tercapai apabila Otoritas Perbendaharaan menyediakan sumberdaya berdasarkan informasi kinerja yang kredibel melalui sistem insentif. Sedangkan *aggregate efficiency* tercapai apabila setiap organisasi pengguna anggaran publik mencapai *operational efficiency* sehingga terjadi penurunan pengeluaran pemerintah secara keseluruhan (Currestine 2008, p. 64-67).

Kedua, meningkatkan akuntabilitas keuangan publik. Dengan adanya prinsip "*let the manager manage*" akan merubah perilaku para manajer publik dalam pengelolaan anggaran publik. Dalam konteks PBK, persepsi para manajer publik akan berubah dari 'berapa jumlah dana atau sumberdaya yang akan dihabiskan?', menjadi 'apa hasil yang akan dicapai?' dalam penyusunan anggaran. Selain itu, melalui suatu perencanaan strategis, para manajer publik akan lebih tepat melakukan identifikasi atas apa yang perlu dilakukan dan apa yang tidak perlu dilakukan dalam bisnis organisasi. Lebih lanjut, prinsip dimaksud juga akan memberikan fleksibilitas kepada para manajer publik dalam pengelolaan keuangan publik. Adanya fleksibilitas dimaksud menuntut diskresi manajer yang lebih besar untuk mengejar hasil yang diharapkan. Kemudian, perubahan perilaku juga disebabkan oleh perubahan orientasi akuntabilitas publik yang menekankan pada pencapaian hasil daripada realisasi anggaran. Dengan demikian, akuntabilitas keuangan publik akan meningkat bilamana anggaran yang disediakan sepenuhnya dipergunakan untuk mencapai hasil yang diharapkan melalui perubahan perilaku pengguna anggaran.

Kewenangan yang lebih besar melalui '*let the manager manage*' menuntut kemampuan manajerial yang mumpuni dalam menggerakkan mesin organisasi. Tantangannya ialah meninggalkan budaya *red-tape* birokrasi menuju budaya kinerja agar organisasi lebih gesit (*agility*) dalam melakukan terobosan kinerja. Kinerja para manajer publik dinilai bukan lagi atas loyalitas kepada atasan namun atas performa capaian kinerjanya. Kewenangan yang lebih luas memberikan ruang bagi para manajer publik agar lebih proaktif dalam mencari preferensi masyarakat dalam menciptakan nilai publik. Dinamika kinerja yang dihasilkan pun tidak lagi hanya terbatas pada apa yang tertulis dalam kontrak kinerja namun jauh daripada itu, bagaimana manajer publik responsif terhadap setiap perubahan lingkungan dan kondisi masyarakat.

Gambar 1 Kerangka Pikir Implementasi PBK



Ringkasnya, kinerja manajer publik tidak hanya mempengaruhi besaran alokasi anggaran yang akan disediakan namun berakibat pada eksistensi organisasi yang dipimpinnya ke depan. Kendati telah melakukan pengukuran kinerja dan menurut pengukuran kinerja dimaksud organisasi pemerintah telah mencapai targetnya, namun hal tersebut tidak secara otomatis menunjukkan bahwa organisasi telah berhasil mencapai tujuannya. Ada suatu penelitian yang menunjukkan kecenderungan manajer publik memanipulasi capaian kinerja sehingga seolah-olah target kinerja telah tercapai sesuai dengan harapan (Fisher and Downes 2008). Untuk itu, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi atas program-program pemerintah untuk memastikan apakah program pemerintah telah berhasil mencapai target sasaran. Untuk menghasilkan hasil evaluasi yang objektif, evaluasi program hendaknya dilakukan oleh tim independen yang merupakan gabungan dari internal organisasi dengan

tenaga ahli dibidangnya.

Implementasi PBK akan merubah orientasi akuntabilitas keuangan publik. Akuntabilitas penganggaran dengan metode tradisional menekankan pertanggungjawaban atas penggunaan input yakni apakah telah sesuai dengan disiplin anggaran. Tingkat akuntabilitasnya menjadi pertanyaan publik karena adanya kecenderungan para manajer publik melakukan eksploitasi sumberdaya yang tersedia untuk kepentingan pribadi atau golongannya. Sebaliknya, PBK lebih menekankan pertanggungjawaban manajer publik atas hasil yang dicapai. Hal itu tercatat dalam informasi-informasi kinerja yang menunjukkan keberhasilan lembaga publik dalam pemenuhan target kinerja. Sehingga, realisasi anggaran bukan menjadi hal yang utama dalam PBK melainkan bagaimana organisasi publik mampu menghasilkan output dan outcome secara lebih efektif dan efisien. Sayangnya, monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran biasanya lebih menekankan

realisasi anggaran daripada capaian hasil atau manfaat. Oleh karena itu, perlu metode evaluasi yang efektif dalam menilai program-program pemerintah.

Ketiga, meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan publik. Transparansi pengelolaan anggaran publik tercapai apabila terdapat informasi kinerja yang kredibel, tidak bias, yang menunjukkan bagaimana organisasi pengguna anggaran dalam mencapai kinerjanya. Informasi kinerja dimaksud merupakan hasil kompilasi dari tiga mekanisme yaitu pengukuran kinerja, monitoring dan evaluasi serta *spending review*. Hasilnya disampaikan kepada Bendahara Umum Negara serta Badan Legislatif sebagai input pendukung dalam proses penetapan pembagian anggaran kepada organisasi/program. Jika dilakukan dengan sistem insentif, maka organisasi/program yang tidak efektif akan mendapat pengurangan dana, relokasi anggaran atau bahkan likuidasi. Sementara organisasi/program yang berkinerja tinggi mendapat apresiasi seperti antara lain peningkatan jumlah pagu anggaran pada periode berikutnya. Atas informasi kinerja dimaksud, lembaga yang mengawasi pelaksanaan APBN perlu mengumumkan hasil kinerja seluruh program pemerintah agar masyarakat luas mengetahui bagaimana pajak negara dipergunakan.

Simpulan

Paparan di atas telah mengungkap kerangka teori implementasi penganggaran yang berorientasi pada pencapaian hasil. Fokusnya adalah penetapan sasaran dan tujuan yang diukur dalam indikator-indikator kinerja, lalu kemudian merinci sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Namun demikian, integrasi proses penganggaran dengan pencapaian hasil belum lah sepenuhnya dikatakan sebagai metode Anggaran Berbasis Kinerja. Alasannya, PBK tidak hanya terbatas pada penetapan hasil yang akan dicapai namun lebih daripada itu yakni apakah hasil (*outcome*) yang dihasilkan telah memenuhi kepentingan

publik dan apakah informasi kinerja dipakai dalam proses penganggaran publik. Untuk mengetahui sejauh mana organisasi pemerintah dapat memenuhi tujuannya, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi yang berorientasi pada hasil (*result-based monitoring and evaluation*).

Penulis berpendapat bahwa PBK tidak hanya sebatas pada adanya hubungan yang jelas antara penganggaran dengan hasil kinerja yang akan dicapai. Terlebih daripada itu, PBK adalah suatu sistem penganggaran publik yang melibatkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta *spending review* untuk memastikan terkumpulnya informasi-informasi kinerja yang *reliable* yang akan pakai oleh pembuat kebijakan dalam menetapkan alokasi anggaran. Kegiatan monitoring dan evaluasi serta *spending review* diyakini akan secara signifikan merubah perilaku pengguna anggaran (*spending units*) agar menggunakan kaidah-kaidah yang baik (*best practices*) sehingga lebih efektif, efisien dan *value for money* dalam mengelola sumberdaya publik.

*) Penulis adalah pegawai Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia



Hasut Tahta

oleh: Agus Suharsono - Widyaiswara Pusdiklat Pajak

Tulisan ini masih ada hubungannya dengan tulisan sebelumnya, Bangsa Besar. Sejarah mencatat bahwa kita, Indonesia, adalah bangsa yang besar. Bahkan ikut andil atas keruntuhan imperium Monggol yang saat itu menguasai dunia. Monggol kalah taktik ketika hendak menaklukkan Jawadwipa. Penyusun strategi itu adalah Arya Wiraraja, pejabat teras yang berbeda pendapat dengan Kertanegara yang ingin menguasai Malaka dengan peperangan, kemudian ia disingkirkan ke Sumenep.

Arya Wiraraja mempunyai anak laki-laki yang sakti gagah perkasa, Ronggolawe namanya. Jika Arya Wiraraja lebih banyak di belakang meja menyusun strategi, maka Ronggolawe adalah orang yang berdarah-darah saat berkobar peperangan membantu tentara Monggol menyerang Singosari. Saat itu Singosari mempunyai patih yang sakti mandraguna, Mahisa Mundarang namanya. Ronggolawe yang berhasil membunuh Mahisa Mundarang.

Bukan hanya itu, Ronggolawe juga berkeringat saat Raden Wijaya membuka hutan Tarik yang dikemudian hari menjadi negara yang besar yaitu Majapahit. Melihat pengabdian Ronggolawe, muncul niat dalam hati Raden Wijaya, jika Majapahit nanti menjadi kerajaan yang besar maka Ronggolawe akan diangkat menjadi Mahapatih. Niat itu tumbuh ketika perjuangan masih ditengah jalan,

ujungnya belum nampak benar.

Waktu berlalu, Majapahit kini menjadi kerajaan yang menampakkan kejayaan. Perdagangan pesat, pertaniannya maju. Raden Wijaya menjadi raja dengan gelar Sri Kertarajasa Jayawardana, dengan Mahapatihnya Nambi, bukan Ronggolawe.

Memang, bukan hanya Arya Wiraraja dan Ronggolawe yang berdarah-darah dan berkeringat membangun Majapahit. Paling tidak sejarah mencatat ada sembilan orang yang menonjol yaitu Ranggalawe, Nambi, Sora, Gajah Pagon, Banyak Kapuk, Pedang, Dangdi, dan Peteng. Siapa yang paling berjasa? Tentu saja sulit menjawabnya, setiap orang mempunyai alasan dan bukti bahwa ia mempunyai andil besar dalam membangun Majapahit, ketika sudah ada tanda-tanda keberhasilan. Sesulit mencari siapa yang salah jika perjuangan gagal. Selain itu, Raden Wijaya yang sudah menjadi raja mempunyai hak veto untuk mengangkat siapa yang menjadi mahapatihnya.

Entah apa yang dulu diucapkan oleh Raden Wijaya sebelum menjadi raja, tetapi ia sangat dekat dengan Arya Wiraraja dan Ronggolawe anaknya. Mungkin seperti janji-janji masa perjuangan yang lain, "tiji tibeh" kepanjangan dari *mukti siji mukti kabeh* dan *mati siji mati kabeh*. Nanti kalau perjuangan kita berhasil saya akan

mukti bersama dengan kalian. Tapi jika kalian mati saya juga akan membela kematianmu. Jika saat ini janji-janji masa perjuangan meraih kedudukan banyak diingkari, mungkin bagian dari kutukan sejarah, karena dulu juga terjadi.

Alih-alih menjadi mahapatih, Ronggolawe diberi jabatan sebagai Adipati Tuban. Sang ahli strategi Arya Wiraraja dipercaya untuk memimpin Lumajang. Dua wilayah yang saat itu jauh terpisah dan jauh dari pusat pemerintahan di Trowulan yang saat ini adalah Mojokerto.

Ada pihak yang berpendapat, Raden Wijaya setelah menikmati tahtanya berpikir ulang. Jika Arya Wiraraja dan Ronggolawe bersatu, akan menjadi ancaman yang tak terkalahkan. Arya Wiraraja otaknya encer dalam strategi dan anaknya Ronggolawe sakti mandraguna. Jika mereka berdua bersekongkol merebut tahta, siapa yang bisa mengalahkan? Segitiga Mojokerto-Tuban-Lumajang yang bisa mengecilkan potensi konflik tersebut, memanjangkan jarak diantara mereka bertiga. Keadaan berubah, perasaan juga berubah. Dulu teman seperjuangan, kini ancaman tahta kerajaan. Entah siapa yang menghembuskan hasutan tersebut. Rupanya tahta membuat yang mendudukinya berubah.

Arya Wiraraja yang sudah sepuh, sepertinya bisa menerima keputusan sang raja, atau paling tidak, diam tidak melakukan perlawanan terbuka. Ronggolawe berbeda, darah muda dan juga darah panglima perangnya berkobar dalam dada. Dibangunnya Tuban menjadi daerah yang maju perekonomian, sebuah keuntungan karena Tuban mempunyai pelabuhan laut. Bukan hanya itu diam-diam ia menyiapkan pasukan yang kuat. Saat itupun tiba, Ronggolawe menyerbu Majapahit dengan tiba-tiba. Raden Wijaya atau Sang Sri Kertarajasa Jayawardana merasa dikhianati teman seperjuangannya.

Keadaan berbalik, demikian juga hati manusia yang juga bolak-balik. Awalnya Ronggolawe merasa dikhianati oleh Raden Wijaya, sekarang giliran Raden Wijaya yang merasa dikhianati sahabatnya. Bukankah Ronggolawe sudah diberi kekuasaan di Tuban, masih kurangkah itu, batin sang Kertarajasa.

Ronggolawe sering digambarkan sosoknya tinggi besar, berkumis tebal, memegang keris terhunus berukuran besar. Wajahnya menyalakan sinar kemarahan. Kisah Ronggolawe memang sangat digdaya, susah dikalahkan jika dihadapi satu lawan satu. Sang raja juga tahu itu. Delapan arya seangkatan Ronggolawe dipandang tidak ada yang bisa menandinginya. Belum lagi pasti hatinya bimbang, Ronggolawe adalah sahabat seperjuangan.

Teman kuliah yang baik, ibaratnya. Mungkin juga mereka takkan mampu mengalahkannya. Mereka sadar, jika dinilai, Ronggolawelah juara dalam pertempuran meruntuhkan Singosari saat membantu tentara Monggol dulu kala. Dengan kudanya yang juga sangat gagah, Ronggolawe memecah barisan lawan, menggulingkan beberapa tentara dan membunuh banyak pimpinan pasukan, termasuk Mahisa Mandarung, panglima tertinggi saat itu. Bukan hanya penunggangnya, kuda Ronggolawe juga sangat ditakuti di peperangan.

Sang raja sadar akan hal itu. Bukanlah delapan arya yang disuruh maju. Masih ada panglima perang yang cukup matang dalam beberapa kali perang besar, yaitu Kebo Anabrang. Kegagalannya dalam ekspedisi pamalayu menaklukkan Malaya bukan bukti kelemahannya. Ia masih disegani karena pengalamannya dan kesetiiaannya tidak terhalang persahabatan satu angkatan dengan Ronggolawe.

Kebo Anabrang sadar, Ronggolawe bukan panglima yang mudah dikalahkan. Tanding satu lawan satu bukan strategi yang baik. Perlu strategi untuk memenangkannya, meski itu sebuah siasat licik. Ditengah perang tanding Ronggolawe dengan Kebo

Anabrang, tanpa dinyana dari empat penjuru angin, segerombolan pasukan Kebo Anabrang menyerbu Ronggolawe yang sendirian. Tahun 1295 perjuangan dan perjalanan hidup Ronggolawe berakhir dengan mengenaskan, dikeroyok sepasukan teman yang dulu dibantu untuk menduduki tahta tertinggi. Disekitar tahta selalu saja ada hasut yang diam-diam dihembuskan pihak-pihak yang ingin dekat dengan tahta. Orang yang duduk di tahta juga selalu was-was tahtanya dirampas. Rasa yang dulu saat berjuang tidak ada sekarang selalu menghembus, yaitu was-was dan curiga. Bukan hanya pihak musuh yang dicurigai tapi teman yang mendudukkannya di tahta. Sahabat yang melindunginya di medan perang.

Kematian Ronggolawe yang tidak wajar membuat amarah salah satu arya satu angkatan Ronggolawe. Dia adalah Sora, paman dari Ronggolawe sendiri, ia termasuk sembilan arya yang ikut membangun Majapahit. Melihat Ronggolawe dibunuh dengan siasat licik, serta-merta Sora menghunus kerisnya, membabi buta Kebo Anabrang ditibas dari belakang. Dua panglima mati mengenaskan, darah mereka mengalir disekitar tahta sang raja.

Sora, juga seperti Ronggolawe, bertaruh tenaga dan nyawa untuk Majapahit. Tidak ada yang menutup mata untuk itu. Entah hasutan dari mana. Sora juga dianggap membahayakan tahta, maka ia diberi jabatan di Kediri, jauh dari Majapahit.

Meskipun Sora membunuh Kebo Anabrang, tidak ada satupun dari arya yang lain melaporkan hal itu kepada sang raja. Anggap saja mereka berdua mati di pertempuran. Sora seperti halnya Arya Wiraraja, dihormati oleh arya yang lain. Hati kecil mereka seolah juga tidak terima Ronggolawe dibunuh dengan licik.

Pemberontak dan pahlawan kadang susah dibedakan, kita yang ada dibawah. Tapi bagi mereka yang duduk di tahta, sepertinya itu mudah. Mereka yang

membahayakan kelanggengan tahta, boleh di cap sebagai pemberontak. Meski dulunya ia adalah pendukung setia pada masa perjuangan. Siapapun yang mendukung kelanggengan tahta adalah pahlawan, tak peduli dulu ia ada dimana saat masa perjuangan. Bunuh-membunuh antar arya yang ikut mendirikan Majapahit belum berakhir, bahkan baru dimulai. Nanti, satu persatu darah arya teman seperjuangannya akan membasahi kaki tahtanya.

Wibawa Sora, membuat kasus pembunuhan Kebo Anabrang tidak sampai ke tahta sang raja. Rupanya itu tidak bertahan lama. Ketika Sora kembali ke Kediri, seseorang membisiki anak Kebo Anabrang untuk menuntut keadilan. Seseorang itu tidak begitu dikenal pada masa-masa perjuangan mendirikan Majapahit, tetapi saat ini sudah masuk dalam lingkaran dalam. Mengipas-ngipas sang raja di tahtanya, untuk mengambil jalan agar bisa duduk di samping raja, di tahta Patih Majapahit.

Sejarah mungkin saja memihak siapa yang menulisnya, sudut pandang dapat saja berbeda. Ronggolawe pemberontak atau pahlawan, bukanlah pertanyaan yang mudah dijawab. Di alun-alun Tuban terdapat monumen Ronggolawe, seekor kuda jantan gagah berdiri dengan dua kaki. Punggung kuda itu kosong, bukankah seharusnya sosok Ronggolawe duduk gagah mengacungkan keris dengan tangan kanannya? Bahkan sejarah setelah 800-an tahun belum juga mampu menjawabnya. Bukan hanya itu, di Cepu juga ada monumen Ronggolawe, yang dinampakkan dengan seekor kuda jingkrak yang gagah sendirian tanpa penunggangnya. Di Jalan Gunungsari, Surabaya juga ada Taman Ronggolawe, yang tampak juga seekor kuda jingkrak tanpa penunggangnya.

Sejarah selalu memberitahu kita bahwa tahta selalu dekat dengan orang yang meniupkan hasut membuat mereka yang duduk diatasnya bisa berubah dan lupa. Lupa berdiri, lupa kawan, lupa lawan, mungkin akan lupa diri.



Foto:Alyn D. Setyaningrum

Lari Yuk!

oleh: Hendra Putra Irawan

Trend lari atau biasa disebut jogging sedang booming beberapa tahun terakhir ini. Olahraga ini relatif lebih murah dan mudah dilakukan oleh siapapun dibandingkan dengan jenis olahraga yang lain. Anda hanya perlu menyiapkan sepatu khusus dan siap untuk berlari!

Banyak literatur yang menyatakan bahwa berlari dapat menurunkan risiko penyakit jantung, stroke, dan diabetes. Memang bisa? Bisa! Tetapi harus dilakukan secara rutin. Memang sangat sulit untuk memulai lari secara rutin. Tetapi jika kita bisa memenuhi target jarak berlari yang kita tetapkan berarti kita sudah mengalahkan hambatan pada diri kita sendiri. Berlari bukan hanya olahraga fisik tetapi juga olahraga mental terhadap hambatan-hambatan pikiran yang kita ciptakan sendiri.

Sebelum merencanakan berlari, sebaiknya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Tampaknya sepele, tetapi ini sangat berguna agar kita mendapatkan hasil yang maksimal.

1. Pilih sepatu yang sesuai

Pilih sepatu yang sesuai dengan kaki Anda. Sepatu yang sesuai dengan ukuran dan ringan dapat mencegah terjadinya cedera saat berlari. Pilih sepatu dengan warna yang memberi semangat. Sedikit berwarna tentu tak akan masalah, bukan?



Foto:Alyn D. Setyaningrum

2. Pakaian

Pakai pakaian yang mudah menyerap keringat. Mengeluarkan keringat banyak bukan berarti anda sehat. Keringat keluar untuk menormalkan suhu tubuh anda. Jangan memakai pakaian tebal untuk mencegah dehidrasi yang berlebihan.

3. Makan dan minum

Makanlah satu jam sebelum berlari agar makanan dapat tercerna maksimal. Lari dalam kondisi kenyang sangat tidak baik. Tetapi sangat dianjurkan untuk minum sebelum berlari. Bawalah persediaan air minum jika anda memilih lokasi yang jauh untuk mencegah dehidrasi.

4. Ketahui lokasi

Sebelum berlari sebaiknya kita telah mengetahui lokasi atau rute yang mana yang akan kita lalui. Rute putaran (lap) atau rute lurus mengikuti jalan yang tersedia di sekeliling perumahan atau di kawasan berolahraga. Tapi sebaiknya hindari jalan raya, ya!



Foto: Alyn D. Setyaningrum

5. Pemanasan

Hal ini wajib dilakukan! Jangan langsung berlari karena akan membuat otot lebih cepat kram. Lakukan pemanasan yang cukup. *Stretching* merupakan awal yang baik sebelum berlari. Jalan selama beberapa saat untuk pemanasan lanjutan sebelum berlari.

6. Kecepatan berlari

Jika anda baru memulai berlari, hindari berlari cepat. Lakukan secara bertahap untuk meningkatkan kecepatan berlari anda. Tetapi harus diingat, berlari bukanlah masalah kecepatan tetapi konsistensi dan jarak yang ditempuh.

7. Tetapkan tujuan

Sebelum berlari sebaiknya tetapkan tujuan anda hari ini. Berapa jarak yang akan anda tempuh, berapa kali putaran yang harus dicapai, atau berapa kalori yang harus dibakar. Ini penting karena terkadang saat berlari kita dapat memberikan *excuse* yang dapat menghambat kita menggapai tujuan tadi.

Setelah semuanya siap, ayo mulai berlari! Tetapi agar kita tetap termotivasi, beberapa tips berikut dapat membantu.

1. Buat target!

Target dapat membantu kita fokus. Tidak ada salahnya membuat target untuk dapat mengikuti event berlari 5K atau 10K. Jika kita mampu mencapai target, tentu akan lebih menyenangkan.

2. Berlari bersama teman

Berlari sendiri membuat kita cepat bosan. Sesekali ajaklah teman-teman Anda untuk ikut berlari bersama. Tentukan lokasi dan waktu yang tepat. Tetapi tidak ada salahnya Anda ikut komunitas berlari. Rasakan sensasi baru berlari bersama orang-orang yang baru Anda kenal!

3. Dengarkan musik

Jika Anda berlari sendiri, mendengarkan musik yang Anda sukai akan meningkatkan semangat. Pilih musik yang akan didengarkan selama berlari. Anda dapat menggunakan *gadget* yang bermacam-macam untuk mendengarkan musik, menemani Anda berlari.

4. Pilih rute yang beragam

Pasti membosankan jika Anda harus melewati rute berlari yang sama setiap kali. Coba lihat kembali lokasi di lingkungan Anda. Pilih rute yang baru dan Anda dapat mengombinasikan rute lama dan yang baru setiap kali Anda berlari. Bergabung dengan komunitas akan lebih memperkaya lokasi rute berlari anda.

5. Gunakan aplikasi

Sekarang ini adalah era digital.

Manfaatkan aplikasi resmi yang menunjang aktivitas berlari Anda yang tersedia di smartphone. Dalam aplikasi tersebut Anda dapat mengetahui jarak, kalori, rute yang telah Anda lakukan. Penggunaan aplikasi juga dapat membantu Anda dalam menetapkan target selanjutnya. Tentunya dengan aplikasi, Anda dapat terhubung dengan teman-teman di media sosial yang mempunyai aktivitas yang sama. Menyenangkan sekaligus bermanfaat.

6. Berlari merupakan bersenang-senang

Berlari merupakan aktivitas untuk menghilangkan stress setelah bekerja seharian atau menghilangkan beban di akhir minggu. Bertemu teman dan menambah kenalan baru dapat menjadi suatu pengalaman baru setiap harinya. Maka bersenang-senanglah ketika berlari! ;)

Tidak sulit, bukan? Jika Anda ingin berlari maka rencanakan mulai sekarang. Jangan tunggu lagi. Ayo berlari!!



Foto: Alyn D. Setyaningrum



Foto: Alyn D. Setyaningrum

Mudah dengan Ms. Word (Bagian Satu): Membuat Daftar Isi Otomatis oleh: Abraham Christianto

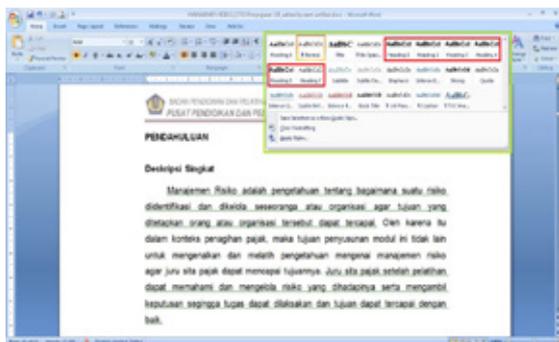
Mudah dengan Ms. Word (Bagian Satu): Membuat Daftar Isi Otomatis

Salah satu “masalah” pekerjaan kantor adalah editing modul. Dan salah satu tantangan terbesar (lagi) dalam editing modul adalah pembuatan daftar isi. Modul yang berisi banyak halaman dan sering revisi tentunya sangat merepotkan, apabila daftar isinya dibuat secara manual. Oleh sebab itu, diperlukan cara jitu untuk membuat daftar isi secara tepat dan akurat.

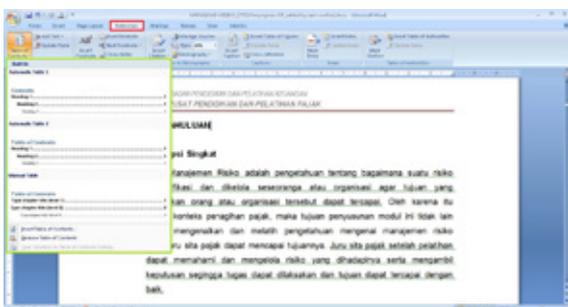
Readers, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bagaimana membuat daftar isi otomatis. Bukan hanya berguna untuk pembuatan modul, tapi juga untuk makalah, karya tulis, skripsi, dan lainnya yang membutuhkan daftar isi. Yang jelas, setelah membaca ini, *Readers* diharapkan mampu membuat daftar isi otomatis. Manual? Out! Hehe..

Secara umum, menu utama yang digunakan adalah “Styles” (Home – Styles – Heading) dan “Table of Contents” (References – Table of Contents). Udah ga sabar? *Check this out*....

Gambar 1: Menu Pulldown Home – Styles – Heading (Kotak merah)

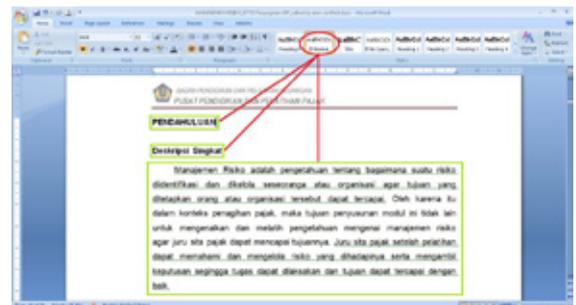


Gambar 2: Menu Pulldown References – Table of Contents



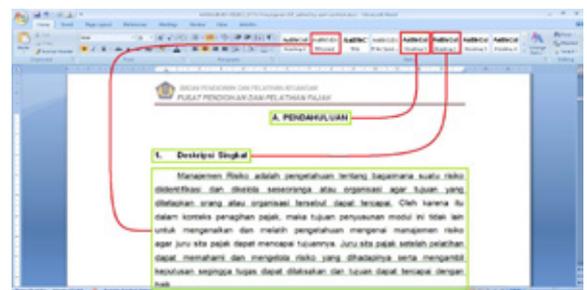
1. Siapkan Dokumen

Pertama-tama, siapkan dulu dokumen yang mau di buatkan daftar isi. Perhatikan, kotak hijau merupakan bagian isi. Lalu perhatikan garis dan lingkaran merah, *settingan* “Styles” default Ms. Word adalah “Normal”. (Gambar 3)



2. Menentukan Heading.

“PENDAHULUAN” merupakan judul BAB, sedangkan “DESKRIPSI SINGKAT” merupakan SUBBAB. Pada pengerjaannya nanti akan dibedakan. Sifatnya, tingkatan SUBnya makin banyak (cth: SUBBAB, SUBSUBBAB), makin tinggi Styles Heading yang digunakan. Biasakan untuk **menentukan Heading terlebih dahulu** sebelum memberikan Numbering (baik berupa huruf ataupun angka). Perhatikan gambar 4.



Gambar 4

3. Konsistensi

Konsistensi maksudnya adalah penerapan format yang sama atas isi suatu bagian dalam dokumen. Penerapan Heading haruslah tepat, sesuai, dan memenuhi unsur kesetaraan. Setara maksudnya, editor harus mampu membedakan kapan penggunaan Heading 1 (BAB), Heading 2 (SUBBAB), Heading 3 (SUBSUBBAB), dst. Pemberian Heading yang kurang tepat dapat menyebabkan Ms. Word salah menerjemahkan bagian dalam daftar isi. Biasakan gunakan fitur “Format Painter” untuk memenuhi unsur kesetaraan.

Apabila seluruh bagian-bagian pokok pada “BAB A. PENDAHULUAN” telah diberikan Heading yang sesuai (Gambar 5), mari melanjutkan pada BAB berikutnya.



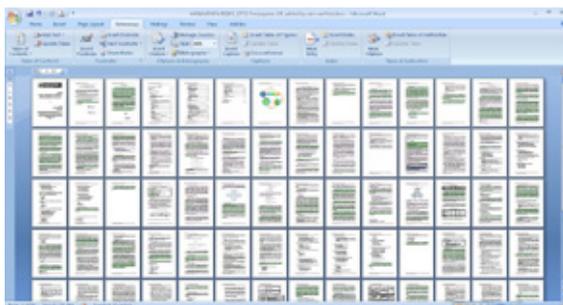
“B. KEGIATAN BELAJAR” adalah setara dengan “A. PENDAHULUAN” oleh sebab itu kedua nya ditentukan Heading 1. Atau, pada bagian ini dapat digunakan fitur Format Painter.

“1. KEGIATAN BELAJAR 1: KONSEP RISIKO DAN MANAJEMEN RISIKO” merupakan SUBBAB dari “B. KEGIATAN BELAJAR”, oleh sebab itu diberikan Heading 2. Perlu diperhatikan, “1. KEGIATAN BELAJAR 1: KONSEP RISIKO DAN MANAJEMEN RISIKO” memang setara dengan “1. DESKRIPSI SINGKAT” pada BAB “A. PENDAHULUAN”, tapi keduanya **tidak memiliki keterkaitan** sehingga tidak dapat digunakan Format Painter. Fitur Format Painter digunakan hanya dan jika hanya dua bagian atau lebih saling terkait.

Sedangkan “1.1. Latar Belakang Organisasi dan Pengertian Manajemen Resiko” merupakan SUBSUBBAB sehingga diberikan Heading 3. Apabila masih ada subbagian lainnya, dapat dipilih Heading berikutnya (Heading 4, Heading 5, dst.)

Bagian yang tidak akan masuk dalam daftar isi, dibiarkan pada kondisi *default*nya (Normal).

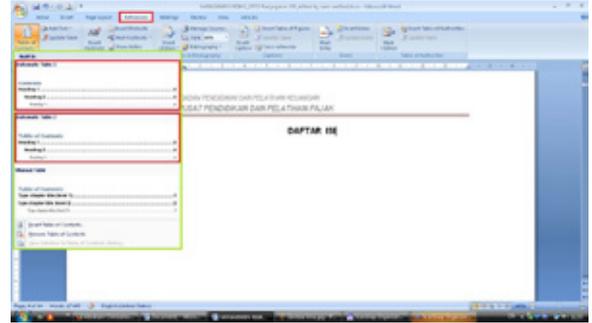
4. Lanjutkan pemformatan pada poin 2 dan 3 hingga akhir dokumen



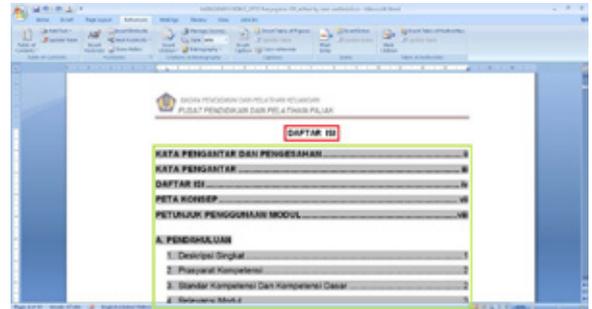
5. Pembuatan Daftar Isi

Apabila seluruh dokumen telah diberikan Heading sesuai dengan bagiannya, tahap terakhir adalah pembuatan Daftar Isi. Pindahkan kursor utama ke halaman daftar isi, kemudian pilih Menu Pulldown References – Table of Contents. Akan terdapat tiga

pilihan, Automatic Table 1, Automatic Table 2, dan Manual Table. Silakan pilih yang Automatic.



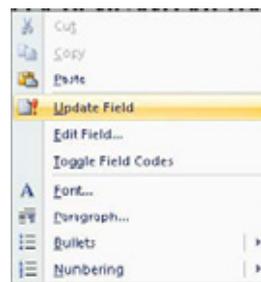
Setelah di klik pada salah satu bagian Automatic, hasilnya akan seperti ini



Daftar isi otomatis telah selesai. Kita tidak perlu lagi khawatir terdapat kesalahan pada pemberian nomor halaman, karena secara otomatis setiap bagian telah ter-link dengan nomor halaman yang dimaksud. Untuk mengecek, tekan “ctrl” lalu klik pada bagian yang ingin dituju, dengan sekejap Ms. Word akan membawa kita pada halaman yang dimaksud.

Kalau-kalau nanti ada revisi yang mengubah urut halaman, apakah harus diulangi step by step?

Simplenya, ga perlu. Apabila ada revisi yang menyebabkan berubahnya urut halaman, kita hanya perlu meng-update daftar isinya. Klik kanan sembarang pada bagian daftar isi, klik update field.



Akan muncul window baru berisikan dua pilihan update page number only dan update entire table.

Update page number only digunakan apabila hanya ingin memperbaharui nomor urut halaman, sedangkan update entire table digunakan apabila user ingin memperbaharui seluruh isi pada daftar isi.



Selesai, selamat mencoba

The Photogenic NYC

Places to Visit, See, and Photograph

oleh: Pilar Wirotama

New York City. There are many words used to describe this city that is also known as the Big Apple. In a song titled *New York, New York* Frank Sinatra called New York as “city that doesn’t sleep.” Meanwhile, in their song, *The Empire State of Mind*, famous musicians Jay Z and Alicia Keys described it as “concrete jungle where the dreams are made of.” As for me, I describe New York as “photogenic city” because this city never fails to amaze me with its views. And I know I am not the only one.

I spent my last two years in New York City. In my spare time, I did mobile photography using Instagram App. Through Instagram, I met new friends who shared the same interest in mobile photography and we explored the city together. In this one page article, allow me to share some of our favorite photo spots in New York City.

1. Dumbo, Brooklyn

Dumbo is an area located in the west side of Brooklyn. If you depart from Manhattan, take the Coney Island bound F train and get off at York St. Station. Walk few blocks to junction between Washington St. and Water St. From this junction you will see the Empire State Building framed with the Manhattan Bridge’s steel legs and surrounded by industrial style buildings. Two blocks from the junction to the west, there is a place where you can see two bridges that connect Brooklyn with Manhattan: Manhattan Bridge and Brooklyn Bridges. Make sure that you check the weather forecast before you go there. You will get the best view during a sunny and bright day.

2. Top of The Rock Observation Deck

Top of the rock observation deck at the Rockefeller building is perhaps the best public rooftop in New York City. On its top, you can enjoy the 360° view of New York. Before you visit the observation deck, make sure to check the viewing time availability on their website (www.topoftherocknyc.com) because visitors per hour are limited. I highly recommend that you make a reservation online. The ticket price is \$25 per person. Yeah, it is little bit pricey, but it is all worth it. After you reserve your viewing time, take the M or F train and make stop at 47st-Rockefeller Center.

The staff will direct you to an elevator that will take you to 67th floor. For the best view, go up two more levels using the staircase to the highest deck where you can enjoy the 360° city view without seeing through the clear glasses. It is recommended that you go up during a sunset or night time. My favorite side is the downtown side. From this side, you can see the Empire State Building with its gorgeous lights.

3. Central Park

Central Park is the largest park in New York City. It is 2.5 miles (4 km) long between 59th Street (Central Park South) and 110th Street (Central Park North), and is 0.5 miles (0.8 km) wide between Fifth Avenue and Central Park West. Must visit places in Central Park are Sheep Meadow, Bethesda Fountain, The Mall, The Lake, and The Pond. To get the exact location of those places, just follow the signs or look at Google Maps on your devices. Central Park is a year-round destination. You can visit it in spring, summer, fall, or winter. Each season offers different ambience and mood.

Places above are only a small part of beauty that New York City has. Just a little suggestion: if you go to New York, make sure that your phone or camera is fully charged so you would not miss a chance to capture its beauty.

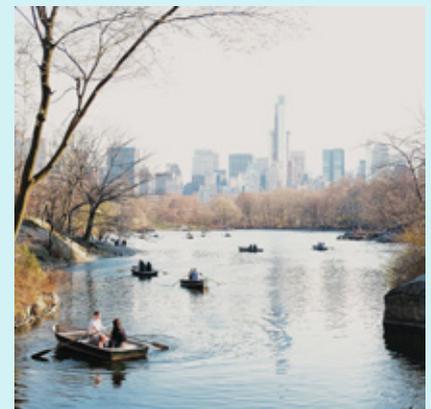


Photo: Pilar Wirotama | Instagram: @wirotama

BPPK memiliki pemangku kepentingan dari seluruh unit eselon I di Kementerian Keuangan. Beberapa pimpinan kantor di beberapa wilayah kerja BDK (Balai Diklat Keuangan) tentu memiliki berbagai kesan, pesan dan harapan untuk BPPK. Edisi ini menampilkan dua kepala kantor yang berada di wilayah kerja BDK Balikpapan dan BDK Medan.

M. Isnaeni, Kakanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur



Wilayah Kalimantan Timur dengan luas kira-kira 15 kali pulau Jawa ini merupakan daerah yang kaya akan barang tambang. Porsi penerimaannya sekitar 40% dari sektor usaha. Medan yang cukup berat, khususnya untuk daerah tambang, yang diimbangi dengan fasilitas infrastruktur yang belum memadai merupakan salah satu keunikan tersendiri bagi wilayah kerja Kanwil Kalimantan Timur. Dengan rencana penerimaan sebesar Rp 18.7 triliun, kami membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas prima. Saat ini, dari sisi kuantitas sumber daya manusia yang ada di delapan kantor di bawah Kanwil Kaltim masih kurang. Sebagai contoh, pada KPP Pratama Balikpapan, kami pernah mengusulkan agar dipecah menjadi dua kantor karena *load* pekerjaan yang sudah cukup banyak. Dengan hampir duaratus ribu wajib pajak yang diawasi oleh enambelas orang, saya rasa itu butuh perhatian khusus. Contoh lain, seperti pada KPP Madya. KPP Madya Balikpapan memiliki target penerimaan 30% dari rencana penerimaan pajak di Kalimantan Timur

sehingga butuh dukungan SDM yang banyak dan berkualitas.

Sepanjang tahun 2013 BPPK melalui BDK Balikpapan telah menyelenggarakan diklat yang cukup sesuai dengan kebutuhan karena sudah disesuaikan dengan kebutuhan kami. Kedepannya, perlu ada ruang komunikasi antara BDK dengan Kanwil agar bisa berdiskusi dan koordinasi terkait pelaksanaan diklat. Ruang komunikasi perlu dibangun sehingga materi yang disampaikan dalam diklat dapat cocok dengan kebutuhan kami. Perlu juga dibicarakan agar IHT yang biasa diadakan oleh Kantor Pusat bisa sebagian dialihkan ke BDK sehingga program diklat yang ada di BDK bisa diperkaya dengan materi IHT tersebut. Selain itu, program diklat yang sifatnya lanjutan dapat pula diselenggarakan di daerah agar *transfer knowledge* bisa rata sampai ke seluruh daerah.

Pardiharto, Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur



BPPK adalah salah satu institusi di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas memberikan pendidikan dan pelatihan, termasuk untuk pegawai di DJPB. Menurut saya BPPK akhir-akhir ini sudah bagus pelayanannya. BPPK sudah langsung tanggap dengan merespon baik permintaan-permintaan dari DJPB.

Saya rasa apa yang dilakukan oleh BPPK sudah tepat, karena mau mendekati kepada kami. Bila dibandingkan dengan hanya memanggil satu atau dua orang ke Jakarta, seperti yang dilakukan kantor pusat, ini tidak efektif. Saya lebih suka ketika BPPK menghadirkan narasumber ke daerah. Libatkan banyak orang yang terkait. Bahkan sampai level pimpinan. Ini akan jauh lebih efektif. Contoh pada saat BDK Malang menyelenggarakan workshop manajemen risiko. Saya sangat mengapresiasi, sangat bermanfaat, bahkan saya bisa bilang hebat! BPPK lakukan itu di tempat kami. Ini sungguh bermanfaat, mungkin nanti bisa dilanjutkan. Daripada satu dua orang dikirim ke pusat, tapi waktu kembali ke daerah

tidak mampu mentransfer pengetahuannya.

Harapan kami BPPK lebih proaktif. Proaktif tidak hanya *by request*. Ibaratnya BPPK berperan sebagai dokter. Diagnosa sakitnya apa, buat resep, lebih aktif ikut menganalisis. Misalkan, ada temuan BPK tahun lalu, masih ditemukan PNBPN pada 30 satker sebesar 2T yang terlambat, kurang/tidak dipungut, belum disetor, indikasi fiktif, digunakan langsung, dll. Berarti ada permasalahan dalam pemahaman pengelolaan PNBPN di 30 satker tersebut. Seharusnya BPPK mampu proaktif dalam hal tersebut dengan membuat satu program diklat, dan mendidik unit-unit yang dianggap kurang paham atas hal tersebut. Karena Kementerian Keuangan itu gurunya adalah BPPK, maka BPPK harus mampu mendiagnosa dan langsung membidik masalah ini, tidak usah menunggu request. Karena bila harus menunggu, akan lama. BPPK harus bisa jemput bola. Lakukanlah pembinaan pada satker.

Horas! Ini Medan Bung!

Foto dan Tulisan: Shera Betania

Kalau berbicara wisata di Sumatera Utara, pasti orang akan menebak Danau Toba. Danau Toba memang danau terluas di Indonesia, sangat terkenal hingga kancan internasional, Tapi tunggu dulu, di Medan juga terdapat tempat-tempat menarik yang wajib dikunjungi loh!

Medan tak hanya ibukota Sumatera Utara, tak juga sekedar kota bisnis. Kota ini terkenal pula dengan kuliner dan wisatanya. Medan mampu memberikan cerita dan warna dalam sentuhan pemandangannya.

Salah satu kawasan bersejarah di Medan adalah Kesawan, yang dikenal juga sebagai Pecinan-nya Medan. Kesawan dulu kala adalah sebagai pusat bisnis kota Medan. Kawasan ini dipadati oleh bangunan-bangunan tua nan bersejarah, seperti Nerderlandsch Indische Escompto Maatschappij, gedung South East Asia Bank, Gedung Jakarta Llyod, gedung PT. London Sumatera dan cafe Tip Top. Saat ini kawasan Kesawan bernama Jalan A. Yani.

Sebuah bangunan rumah diantara gedung-gedung perkantoran dengan arsitektur campuran antara Cina, Eropa, dan Melayu, yang berada di sisi jalan Kesawan menarik perhatian. Rumah Tjong A Fie, demikian bangunan ini dikenal. Nama Tjong A Fie tidak bisa dilepaskan dari sejarah Medan.

Tjong A Fie adalah salah satu orang terkaya di Asia Tenggara pada tahun 1900an kelahiran Kanton, Cina. Bersama saudaranya Tjong Yong Hian, ia merantau ke Deli dan membuka lahan-lahan tembakau. Rumah Tjong A Fie dibuka untuk umum sejak Juni 2009 dan menjadi salah satu bangunan cagar budaya yang dilindungi pemerintah kota Medan. Arsitektur yang memadukan budaya Cina, Melayu dan Eropa sangat kental terasa di tiap sudut rumah ini. Deretan jendela dan pintu yang berwarna hijau dan kuning memperlihatkan budaya Melayu. Ornamen, ukiran dan lukisan tangan di langit-langit rumah memberikan nuansa budaya Cina. Sedangkan perabotan yang ada di rumah ini termasuk modern di masanya, memberikan sentuhan Eropa kedalamnya.

Tak jauh dari Rumah Tjong A Fie, kita bisa kembali menikmati nuansa 'jadul' di Restoran Tip Top. Restoran ini menjadi salah satu primadona dan tujuan wisata kuliner saat berada di Medan. Restoran Tip Top berdiri sejak tahun 1934 dengan nama Jang Kie. Menyatu dengan nuansa kolonial, menu di restoran ini menyajikan makanan dan minuman dengan tiga tipe pilihan menu, yaitu Western (Eropa), Chinese, dan Indonesia. Berbagai pilihan kue juga tersedia di restoran ini, seperti kue taart, rolade, bitterballen, risolles,

donat, kroket, dan pilihan kue lainnya. Yang menarik adalah cara pembuatan semua makanan di restoran ini masih menggunakan tungku tradisional yang ada sejak tahun 1934.

Medan memiliki daya tarik kuliner yang tinggi. Salah satu tempat 'nongkrong' sekaligus ikon kota durian ini adalah Merdeka Walk yang berada di sebelah Lapangan Merdeka. Bagi penggemar seafood, Medan memiliki tempat makan dengan cita rasa bintang lima namun rasa kaki lima. Wajir Seafood buka mulai pukul 06.00 sore hingga malam hari. Tempat yang berada di jalan Wajir ini, tak jauh dari kawasan Kesawan, selalu penuh dengan pelanggan, hampir dipastikan Anda harus bersedia mengantri untuk menikmati nikmatnya Tom yam Seafood, ikan bakar dan menu seafood lainnya yang menggoda.

Bangunan bersejarah lainnya yang terdapat di kota Medan adalah Istana Maimoon. Istana yang terletak di Jl. Brigjen Katamso ini dirancang oleh seorang arsitektur Belanda dan menjadi salah satu 'landmark' kota Medan. Istana Maimoon dibangun di tahun 1888 dan diresmikan pada tahun 1891, melambangkan kebesaran kerajaan Melayu di Sumatera Utara. Landmark medan lainnya adalah Masjid Raya Al-Mashun di Jl. Masjid raya, tak jauh dari Istana Maimoon. Masjid ini juga





Tjong A Fie



Tip Top



Wajir Seafood



Durian Ucok



Rahmat Museum



Masjid Raya Medan

dibangun oleh arsitektur yang sama membangun Istana Maimoon, dengan sentuhan budaya Maroko.

Medan adalah surganya durian. Sedemikian identiknya Medan dengan durian karena di kota ini kita bisa menemukan durian dengan mudahnya. Anda bisa menikmati durian sepanjang tahun di medan. Medan sendiri adalah salah satu penghasil durian paling enak se-Indonesia. Salah satu idola bagi para pencinta durian adalah Durian Ucok. Warung ini sudah menjadi *trademark* pencinta durian di Medan. Beratus-ratus buah durian menyambut kehadiran pengunjung warung Ucok Durian. Yang membuat Ucok Durian menarik adalah garansi yang diberikan penjual, jika durian dirasa tidak enak maka bisa ditukar dengan yang enak dan tidak perlu membayar jika durian yang dibeli tidak enak. Saat ini Ucok Durian telah memiliki beberapa gerai dan dengan konsep yang lebih teratur dan rapi. Beberapa meja dan kursi disediakan sehingga pembeli bisa menikmati durian dengan lebih nyaman.

Jika ingin membawa durian sebagai oleh-oleh, saat ini telah hadir pancake

durian, hasil kreasi warga medan. Pancake durian adalah daging durian yang dibalut dengan kulit yang terbuat dari tepung pandan.

Satu lagi tempat yang cukup menarik. Rahmat International Wildlife Museum & Gallery, sebuah museum milik Rahmat Shah, seorang pengusaha yang mempunyai hobi berburu konservasi dan menjelajah alam. Tempat ini merupakan kawasan wisata sekaligus sarana pendidikan yang bisa dinikmati oleh siapa saja. Rahmat International Wildlife Museum & Gallery mempunyai lebih dari seribu spesies satwa yang berasal dari seluruh penjuru dunia.

Koleksi di museum ini merupakan hasil perburuan legal dan juga sumbangan atau pembelian, yang semuanya dilakukan secara legal.

Kota Medan memiliki percampuran budaya yang hampir sama dengan Singapura. Di kota ini kita bisa melihat tiga budaya yang kental, yaitu Melayu, Chinese, dan India. Di salah satu sudut kota Medan, ada satu wilayah yang dikenal dengan nama Kampung Madras atau yang lebih sering dikenal

dengan Kampung Keling. Di kampung ini banyak bermukim warga Medan keturunan India, kuliner khas India, dan kuil Hindu yang menjadi ikon kawasan ini.

Kota Medan sangat menarik untuk ditelusuri. Budaya yang berbaur di dalam masyarakatnya, memberikan rasa dan nuansa yang berbeda. Akulturasi budaya di Medan bisa ditemui tidak hanya melalui bangunan dan kuliner. Budaya masyarakat bahkan transportasinya memberikan warna yang sangat menarik bagi kota medan. Salah satu transportasi khas Medan adalah betor, becak motor.

Berada di Medan bisa jadi mengajak Anda untuk belajar keragaman budaya yang ada di Indonesia. Suasana di Kota Medan begitu ramai dan terkadang sedikit bising. Hampir semua orangnya bicara dengan nada yang kencang, ditambah dengan bunyi klakson mobil yang tak berhenti terdengar. Siapkan diri Anda dan jangan kaget ketika berada di suasana medan yang sangat ramai ini. Ini Medan, Bung!

HORAS!

Kalender Diklat BPPK 2014...



Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan



Pusdiklat Bea dan Cukai



Pusdiklat Kekayaan Negara
dan Perimbangan Keuangan



Pusdiklat Pajak



Pusdiklat Keuangan Umum



Pusdiklat Pengembangan
Sumber Daya Manusia



Resensi Buku “Kerugian Keuangan Negara”

Oleh: Agus Suharsono -
Widyaiswara Pusdiklat Pajak

Judul buku : Kerugian Keuangan Negara
Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan
Hukum Progresif

Penulis : Hernold Ferry Makawimbang

Penerbit : Thafa Media, Yogyakarta

Cetakan : I, Februari 2014

Tebal : xxvi + 460 Halaman

ISBN : 978-602-14207-8-2

Tindak Pidana Korupsi seolah tidak terpisahkan dari perjalanan bangsa Indonesia, hanya saja dasawarsa terakhir menjadi sorotan masyarakat. Setelah tertangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar muncul

istilah triaskoruptika. Ungkapan satir bahwa korupsi sudah merasuh tidak hanya eksekutif, tetapi juga legislatif dan yudikatif. Kasus Akil Mochtar belum juga divonis, masyarakat dikejutkan dengan dijadikannya Menteri Agama, Suryadharma Ali sebagai tersangka korupsi di Kementerian Agama. Bagaimana tidak terkejut jika Kementerian Agama yang seharusnya agamis terindikasi kasus korupsi untuk urusan ibadah haji. Sebenarnya tahun 2006 Said Agil Husin Al-Munawar, Menteri Agama saat itu, juga sudah masuk penjara karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi Dana Abadi Umat. Kita tidak bisa mengatakan Menteri Agama tidak boleh korupsi karena semua menteri dan jajaran di bawahnya tidak boleh korupsi. Juga anggota parlemen dan hakim.

Tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mempunyai unsur “...dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Hanya menurut Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH masing-masing penegak hukum sering memberikan interpretasi yang berbeda-beda, khususnya yang berkaitan dengan instansi mana yang berwenang melakukan penghitungan dan penentuan jumlah kerugian keuangan negara dalam putusan pengadilan (hal. ix). Buku ini mencoba membahasnya dari sisi konseptual, karena dari sudut pandang hukum progresif tentunya akan beranjak dari sisi empiris.

Bagi yang terbiasa membaca buku-buku kajian hukum, ada yang berbeda dalam buku ini yaitu, buku ini mempunyai 26 tabel dan 7 gambar skema. Tidak biasanya buku kajian ilmu hukum berisi banyak tabel dan gambar skema, tapi hal ini memudahkan dalam memahami karena penulis memberi gambaran besarnya di awal tulisan sebelum membahas detailnya. Selain itu, buku ini kuat dari sisi konsep teoritis tetapi juga didukung implementasinya. Konsep teoritis dibahas dalam lima bab, implementasi dalam sebelas bab, ditambah bab kesimpulan dan saran. Fokus studi yang dibahas dalam

buku ini adalah Putusan Pengadilan Tipikor Tahun 2010 dan 2011 di Wilayah Pengadilan Jakarta, Banten, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Pontianak. Kajian ilmiah yang cukup komprehensif, mengingat buku ini dikembangkan dari tesis untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum. Penulisnya adalah investigator dan ahli kerugian keuangan negara di Badan Pemeriksa Keuangan RI yang sejak 2014 memilih untuk pensiun muda (usia 52 tahun).

Salah satu hal menarik adalah perbedaan antara kerugian negara dengan kerugian keuangan negara. Kerugian negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara merupakan ranah hukum administrasi yang seharusnya dikenakan sanksi administrasi. Sedangkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang masuk dalam ranah hukum pidana seharusnya dikenakan sanksi pidana (hal. 19).

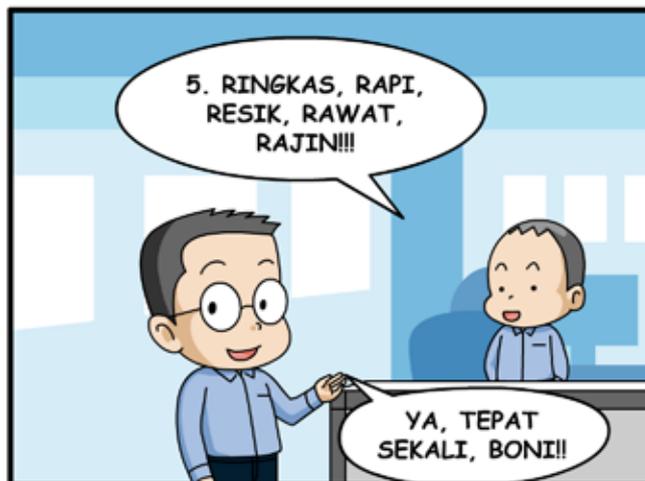
Banyak hal yang dapat kita pelajari dalam buku ini. Pada kesimpulannya disebutkan antara lain, bahwa besar kecilnya kerugian negara tidak mempunyai hubungan signifikan dalam penentuan berat atau ringannya hukuman pidana. Masih terdapat putusan pengadilan yang tidak mengenakan “pidana denda”. Terdapat putusan Mahkamah Agung sebagai *rule breaking* perspektif yang progresif karena mengklasifikasikan penyuaipan sebagai “kerugian keuangan negara” sehingga dikenakan hukuman tambahan “uang pengganti” sebagai penterjemahan dari “apel Washington dan apel Malang”.

Masih banyak hal yang akan Anda dapatkan di buku ini, jadi sebaiknya membaca sendiri. Buku ini baik untuk dijadikan rujukan jika ingin membahas korupsi dari sudut pandang hukum administrasi dan dari sudut pandang hukum pidana.

Kang Edu



Oleh: Bimo





KEMENTERIAN KEUANGAN RI
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN



KORUPTOR

EDUKASI
KEUANGAN

EDISI 22/2014

Jl. Purnawarman No. 99 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12210
Telp: +62 22 7394666, 7244873
Fax: +62 22 7262275
<http://www.bppk.kemenkeu.go.id>